

**STRATEGI PARTAI KOALISI DALAM PEMENANGAN EVA DWIANA
DAN DEDDY AMARULLAH PADA PEMILIHAN WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020**

(Tesis)

Oleh :

KHAIRUNNISA MAULIDA



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

STRATEGI PARTAI KOALISI DALAM PEMENANGAN EVA DWIANA DAN DEDDY AMARULLAH PADA PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

Oleh

KHAIRUNNISA MAULIDA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Nasional Demokrat (NasDem) dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berkoalisi dalam mendukung pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah pada pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Proses terbentuknya partai politik koalisi pasangan calon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah; (2) Strategi kemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah pada Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terbentuknya koalisi partai PDI Perjuangan, NasDem dan Gerindra berdasarkan kepentingan pragmatis. Strategi kemenangan yang lebih berpengaruh dalam kemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah adalah strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan. Temuan utama dalam penelitian ini adalah koalisi partai di tingkat nasional tidak berpengaruh dalam partai politik berkoalisi di tingkat lokal dalam hal ini koalisi partai politik di Bandar Lampung tahun 2020. Partai politik di tingkat lokal dalam pemilihan kepala daerah lebih menyukai pembayaran kandidat secara langsung (*Pay-Offs*). Temuan unik dalam penelitian ini adalah bahwa dalam pilkada partai politik lebih berperan dalam hal administratif dan sebagai agen serta lembaga non-formal mempunyai peran penting dalam meraih dukungan masyarakat. Rekomendasi penelitian selanjutnya adalah menganalisis mengenai partai politik sebagai agen dalam pilkada.

Kata Kunci: Strategi Pemenangan, Partai Koalisi, Pemilihan Walikota

ABSTRACT

STRATEGY OF THE COALITION PARTIES IN WINNING EVA DWIANA AND DEDDY AMARULLAH IN THE MAYOR ELECTION AT BANDAR LAMPUNG ON 2020

By

KHAIRUNNISA MAULIDA

Indonesian democratic party of struggle (PDI P), National democratic party (NasDem) and great movement party (Gerindra) are in a coalition to support Eva Dwiana and Deddy Amarullah in the 2020 mayor and deputy mayor election of Bandar Lampung. This study aimed to determine : (1) the coalition forming process of political parties for the candidates of Eva Dwiana and Deddy Amarullah; (2) Eva Dwiana and Deddy Amarullah's winning strategy in the 2020 mayor election. This research applied descriptive qualitative method. The results showed the coalition formation of PDI P, NasDem and Gerindra party was based on pragmatic interest. The winning strategy that is more influential in the victory of Eva Dwiana and Deddy Amarullah is the strategy of supporting resources and institutional strategy. The main finding in this study was that parties coalition at the national level had no effect on coalition political parties at local level, in the term of political party coalition in Bandar Lampung on 2020. Political parties at the local level in regional head coalitions preferred direct payment of candidate (Pay-off). The unique finding of this research was that in the regional election, political parties play a more administrative role and as agents and non-formal institutions who had an important role in gaining community support. The recommendation of this study is that the next researcher analyzes political parties as agents in the regional elections.

Keywords : Winning Strategy, Coalition Party, Mayor Election

**STRATEGI PARTAI KOALISI DALAM PEMENANGAN EVA DWIANA
DAN DEDDY AMARULLAH PADA PEMILIHAN WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020**

Oleh :

KHAIRUNNISA MAULIDA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Tesis

: **STRATEGI PARTAI KOALISI DALAM
PEMENANGAN EVA DWIANA DAN DEDDY
AMARULLAH PADA PEMILIHAN
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN
2020**

Nama Mahasiswa

: **KHAIRUNNISA MAULIDA**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1926021012**

Program Studi

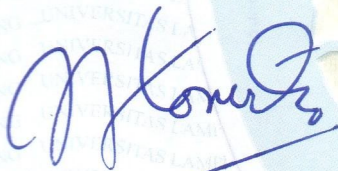
: **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

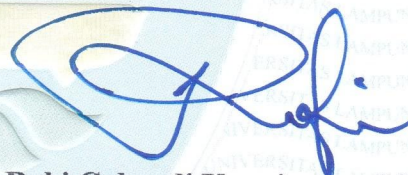
: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

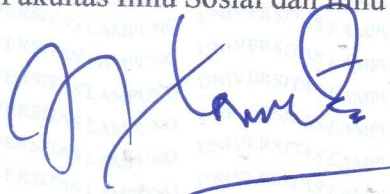


Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP: 196010101986031006



Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP. M.A.
NIP: 197804302005011002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

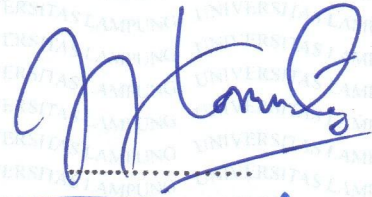


Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP: 19601010 198603 1 006

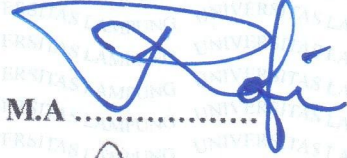
MENGESAHKAN

1. TimPenguji

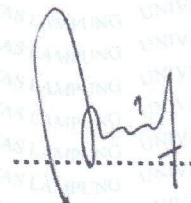
Ketua : Drs. Hertanto, M.Si, Ph.D.



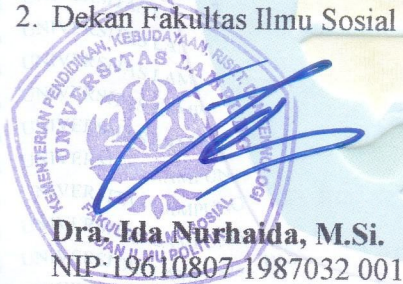
Sekretaris : Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A



Anggota : Arizka Warganegara, Ph.D.

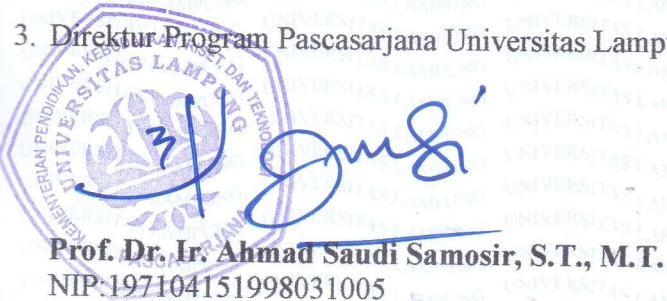


2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP:196108071987032001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP:197104151998031005

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 2 November 2021

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 1 November 2021



Khairunnisa Maulida
NPM. 1926021012

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Khairunnisa Maulida dilahirkan di Jakarta, pada 23 Juli 1997. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara putri dari Bapak Zainal Arifin, SE dan Ibu Tuti Herawati Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2002-2003 di TK Pertiwi Panaragan Kabupaten Tulang Bawang Barat, dilanjutkan di SDN 1 Panaragan Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2003-2009.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Tulang Bawang Tengah tahun 2009-2012 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Tulang Bawang Tengah tahun 2012-2015. Selanjutnya penulis lulus dari Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada tahun 2019.

Selama masa perkuliahan di S-1 Ilmu Pemerintahan penulis berhimpun dalam beberapa organisasi. Penulis menjadi anggota Muda LSSP Cendekia FISIP Unila tahun 2015-2016, anggota magang LPM Republica tahun 2015-2016, menjadi pengurus Dana Usaha HMJ Ilmu Pemerintahan tahun 2016-2017, menjadi Staff BEM FISIP Unila tahun 2016 dan Penulis menjadi Sekretaris Umum HMJ Ilmu Pemerintahan FISIP Unila tahun 2017-2018. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan pada tahun 2019 dengan tercatat sebagai mahasiswa di Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung melalui program beasiswa.

MOTTO

“Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit”

(Nabi Muhammad S.A.W)

“Motivasi terbesar dalam hidupmu adalah dirimu sendiri, seribu orang maupun jutaan orang yang memotivasi dirimu takkan berarti jika tidak ada kesadaran diri dalam hidupmu”

(Khairunnisa Maulida)

“Kamu Lebih Kuat dari Apa yang Kamu dan Orang Lain Pikirkan”

(Khairunnisa Maulida)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga Kelak
Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta
serta kakakku dan adik-adikku yang ku sayangi sebagai tanda bakti, hormat dan
cintaku.

Terima kasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan.

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Program Pascasarjana
Magister Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan
mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis cintai dan banggakan
Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Tesis yang berjudul “Strategi Partai Koalisi dalam Pemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020” sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Tesis ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yaitu Bapak Zainal Arifin, Alm Mamah Tuti Herawati dan Ibu Meidalia atas segala doa yang tcurahkan, dukungan, kasih sayang dan perhatian yang tidak akan mampu penulis balas atas banyaknya kebaikan yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa Alm Mamah tercinta dan menempatkan mamah disurga-Nya dan memberikan Bapak dan Ibu perlindungan, Kesehatan dan kasih sayang-Nya serta balasan atas kebaikan yang diberikan kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kakak dan Adik-Adik Penulis

yaitu Retma Aulia Arifin, Rizki Rahman Arifin, Nurul Alfiah dan Siti Muawwanah atas dukungan dan kasih sayang selama ini, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan kemudahan dalam kalian mencapai cita-cita untuk membahagiakan Orang Tua.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si, selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung dan sebagai Pembimbing Utama Tesis, terimakasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis. Semoga atas segala yang bapak berikan menjadi amalan kebaikan untuk bapak di dunia maupun di akhirat.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan selaku Pembimbing kedua. Terimakasih atas bimbingan, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis. Semoga budi baik bapak menjadi amalan kebaikan untuk bapak di dunia maupun di akhirat.
6. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D selaku Dosen Pembahas. Terimakasih atas kritik, saran, motivasi dan bimbingan sehingga tesis ini memiliki kemajuan yang signifikan pada setiap perbaikan. Semoga budi baik bapak menjadi amalan kebaikan untuk bapak di dunia maupun di akhirat.

7. Seluruh Dosen di Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik, memberikan ilmu, pengalaman, pembelajaran hidup serta pengetahuan yang diberikan semasa perkuliahan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran dalam memberikan perkuliahan di Magister Ilmu Pemerintahan.
8. Semua teman-teman seperjuangan di pascasarjana Ilmu Pemerintahan angkatan 2019 baik dari konsentrasi Polotda, MP dan TKP terimakasih atas kebersamaannya, suatu kebahagiaan bisa bertemu kalian semua.
9. Sahabat tercinta terkhusus, Muna, Shelvy, Liana, Verlia, Ade, April, Luki, Acel, Amel Adi, Dwi, Fadel dan Juki terimakasih atas segala dukungan, semangat dan motivasi yang kalian berikan.
10. Adik-Adik Ilmu Pemerintahan, Nina, Ara, Mia, Cia, Ayu, WW, Tita, Mpit, Nu, Clara Bari dan Aziz yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan menemani penulis dalam melakukan wawancara kepada semua narasumber serta mengisi hari-hari penulis selama proses penyusunan tesis.
11. Mba tersayang Vivi Alvionta yang telah bersedia mendengar keluh kesah penulis, memberikan motivasi kepada penulis ketika penulis ada di masa *down* dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini taklupa juga terimakasih untuk mbaku tersayang Iranda Putri kakak tingkat dimasa S1 dan menjadi teman seperjuangan di masa S2 terimakasih telah memberikan dukungan, motivasi, kritik dan saran dalam membantu lancarnya proses penyelesaian tesis ini. Mba Suci Pebrina terimakasih untuk saran terhadap tesis ini, terimakasih sudah berbagi pengalaman kepada penulis.

12. Keluarga besar Alung Pool terimakasih kepada Abi, Ami, Nina, Mpi, Alung dan semua penghuni rumah Alung Pool. Terimakasih atas dukungan, kebaikan selama ini, serta waktu dan tempat yang diberikan kepada penulis. Semoga kalian sekeluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
13. Narasumber penelitian, terimakasih untuk semua narasumber yang telah memberikan informasi dan dukungan kepada penulis sehingga tesis ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian kepada penulis.

Bandar Lampung, 24 Oktober 2021

Khairunnisa Maulida

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL.....	vi
-------------------	----

DAFTAR GAMBAR	viii
---------------------	------

I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Partai Politik	10
2.1.1 Pengertian Partai Politik	10
2.1.2 Fungsi Partai Politik	12
2.2 Koalisi Partai Politik	14
2.2.1 Pengertian Koalisi Partai Politik.....	14
2.2.2 Sumberdaya Koalisi Partai Politik.....	16
2.2.3 Motif Koalisi Partai Politik.....	17
2.2.4 Formasi Koalisi Partai Politik.....	18
2.3 Patronase, Pembayaran (Pays-offs) dan Koalisi Partai.....	18
2.3.1 Efek Ideologi dan Koalisi Nasional	21
2.3.2 Manfaat Patronase Jangka Panjang Vs Jangka Pendek	21
2.4 Strategi.....	23
2.4.1 Pengertian Strategi.....	23
2.4.2 Tipe-tipe Strategi	24
2.5 Kerangka Pikir	25
III. METODE PENELITIAN	28
3.1 Tipe Penelitian	28
3.2 Fokus Penelitian.....	29
3.3 Informan.....	30
3.4 Jenis dan Sumber data	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Pengolahan Data	36
3.7 Teknik Analisis Data	37
3.8 Teknik Keabsahan Data	38

IV. GAMBARAN UMUM.....	40
4.1. Sejarah Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung.....	40
4.2. Profil Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020....	42
4.2.1 Profil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020	43
4.2.2 Profil Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020	43
4.2.3 Visi, dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020	44
4.3. Koalisi Partai Politik Pengusung Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	46
4.4. Tim Kampanye dan Penghubung Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	59
4.5. Koalisi Partai Politik dalam Pilkada di Indonesia.....	60
 V. HASIL DAN PEMBAHASAN	 64
5.1 Pembentukan Koalisi Partai Politik Pengusung Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.....	65
5.1.1 Efek Ideologi dan Koalisi Nasional.....	65
5.1.2 Manfaat Patronase Jangka Pendek versus Jangka Panjang (<i>Short-term versus Long-term Patronage Benefits</i>)	81
5.2 Strategi Pemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.....	106
5.2.1 Strategi Organisasi (<i>Corporate Strategy</i>).....	106
5.2.2 Strategi Program (<i>Program Strategy</i>).....	111
5.2.3 Strategi Pendukung Sumber Daya (<i>Resource Support Strategy</i>)	114
5.2.4 Strategi Kelembagaan (<i>Institutional Strategy</i>)	119
5.3 Telaah Akhir.....	127
 VI. SIMPULAN DAN SARAN	 133
6.1 Simpulan	133
6.2 Saran.....	134
 DAFTAR PUSTAKA.....	 135
 LAMPIRAN.....	 143

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Suara Sah Partai Politik Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019	2
2. Jumlah Kursi Partai Politik di DPRD Kota Bandar Lampung tahun 2019-2024	2
3. Nama Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung dalam Pilkada Serentak Tahun 2020.....	4
4. Hasil Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020	5
5. Informan Penelitian.....	31
6. Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015	41
7. Daftar Nama Pasangan Calon Pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2010	41
8. Daftar Nama Pasangan Calon Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015	42
9. Struktur Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung.....	51
10. Struktur Kepengurusan DPC Partai Gerindra Kota Bandar Lampung.....	54
11. Struktur Kepengurusan DPC Partai NasDem Kota Bandar Lampung.....	58
12. Daftar Partai Koalisi Ditingkat Nasional dalam Pilpres Tahun 2014 dan Tahun 2019	75
13. Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020	116
14. Akun Media Sosial Resmi dalam Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	27
2. Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019	66
3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2014 Dan Partai Politik Pengusung	76
4. Daftar Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019	76
5. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Partai Politik Pengusung	77
6. Alur Isi Pembahasan (1).....	80
7. Hasil Penelitian Hendrawan dkk (2021)	81
8. Alur Isi Pembahasan (2).....	105
9. Slogan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	111
10. Alur Isi Pembahasan (3).....	126

DAFTAR SINGKATAN

Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Paslon	: Pasangan Calon
Pilwakot	: pemilihan walikota dan wakil walikota
Parpol	: Partai politik
Pilpres	: Pemilihan Presiden
Pemda	: Pemerintah Daerah
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SDM	: Sumber Daya Manusia
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
SK	: Surat Keputusan
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia
NasDem	: Nasional Demokrat
Gerindra	: Gerakan Indonesia Raya
AD	: Aturan Dasar
ART	: Aturan Rumah Tangga
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
PAN	: Partai Amanat Nasional
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
Perindo	: Partai Persatuan Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
Golkar	: Golongan Karya

PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
JPPR	: Jaringan Pendidik Pemilih Rakyat
LIS	: Lampung Independen Survei
Pilgub	: Pemilihan Gubernur
TSM	: Terstruktur, Sistematis dan Masif
MA	: Mahkamah Agung
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
PAC	: Pimpinan Anak Cabang
Bappilu	: Badan Pemenangan Pemilu
SGC	: Sugar Group Companies
PN	: Pengadilan Negeri
Tipikor	: Tindak Pidana Korupsi
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
FITRA	: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
BPIP	: Badan Pembina Ideologi Pancasila
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
SPAM	: Sistem Pengelolaan Air Minum
LPSDK	: Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bentuk praktik demokrasi langsung di level pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota. Praktik demokrasi tersebut terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu aspek kompetisi antar kandidat, partisipasi dan kebebasan (liberalisasi). Aspek kompetisi berkaitan dengan cara ataupun strategi yang digunakan untuk menjadikan kandidat sebagai calon kepala daerah (Arif, 2019).

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan dasar pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sistem pemilihan presiden dan kepala daerah di Indonesia yaitu seseorang dicalonkan untuk jabatan tersebut oleh sebuah partai politik dan gabungan partai politik. Partai politik adalah mesin politik yang mempunyai daya mobilisasi massa paling besar dan sistematis (Djuyandi, 2011).

Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, partai politik memiliki syarat untuk mendaftarkan calon dalam pemilihan umum. Syarat bagi partai politik yang telah disebutkan dalam Undang-Undang tersebut adalah :

“Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”.

Syarat perolehan 20% dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung tidak terpenuhi oleh semua partai politik yang ada di Parlemen Kota Bandar Lampung. Berikut jumlah suara sah dan jumlah kursi legislatif di DPRD Kota Bandar Lampung :

Tabel 1. Jumlah Suara Sah Partai Politik Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019

No	Nama Partai Politik	Jumlah Suara Sah	Persentase Suara
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	85.988 Suara	17,41%
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	68.445 Suara	13,86%
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	68.275 Suara	13,82%
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	48.600 Suara	9,84%
5.	Partai Amanat Nasional (PAN)	58.866 Suara	11,92%
6.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	55.460 Suara	11,23%
7.	Partai Demokrat	38.778 Suara	7,85%
8.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	28.869 Suara	5,84%
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	20.767 Suara	4,20%
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	19.780 Suara	4,00%
Jumlah		493.828	100 %

Sumber : KPU Bandar Lampung (2020)

Tabel 2. Jumlah Kursi Partai Politik di DPRD Kota Bandar Lampung tahun 2019-2024

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi Parlemen	Persentase
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	9 Kursi	18%
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	7 Kursi	14%
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	6 Kursi	12%
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	6 Kursi	12%
5.	Partai Amanat Nasional (PAN)	6 Kursi	12%
6.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	5 Kursi	10%
7.	Partai Demokrat	5 Kursi	10%
8.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3 Kursi	6%

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi Parlemen	Persentase
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2 Kursi	4%
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1 Kursi	2%
	Jumlah	50 kursi	100%

Sumber : KPU Bandar Lampung (2020)

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 tentang jumlah suara dan jumlah kursi partai politik di DPRD Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa tidak ada satupun partai politik yang memenuhi persyaratan untuk pencalonan kepala daerah dengan minimal 20% kursi di Parlemen. Total kursi di DPRD Kota Bandar Lampung adalah 50 kursi, oleh sebab itu partai politik harus mempunyai 10 kursi atau 20% dari total 50 kursi di DPRD Kota Bandar Lampung. Kursi terbanyak diperoleh oleh PDI Perjuangan dengan jumlah 9 kursi namun belum memenuhi persyaratan pencalonan kepala daerah. Syarat bagi partai politik untuk mencalonkan paslon belum terpenuhi maka partai politik harus berkoalisi untuk bisa mencalonkan kepala daerah.

Pilkada tahun 2020 akan diikuti oleh 270 daerah yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan pada Desember 2015. Rincian 270 daerah tersebut adalah 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota (Detikcom, 2019). Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020. Pemilihan wali kota dan wakil wali Kota Bandar Lampung diadakan karena masa bakti Herman HN selaku walikota Bandar Lampung terpilih selama dua periode yaitu 2010-2015 dan 2015-2020 akan segera berakhir.

Dedi Triadi selaku Ketua Komisioner KPU Bandar Lampung menginformasikan kepada media Kompas.com bahwa :

“Tiga pasangan calon kepala daerah resmi siap bersaing memperebutkan kursi wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung, semua syarat calon dan syarat pencalonan dari tiga pasangan calon telah memenuhi semua. Ketiga Paslon ini adalah Eva Dwiana - Dedi

Amarullah, Yusuf Kohar - Tulus Purnomo, dan Rycko Menoza - Johan Sulaiman”(Jaya, 2020).

Semua pasangan calon tersebut diusung oleh beberapa partai politik yang berada di parlemen Kota Bandar Lampung. Berikut daftar tabel nama partai politik pengusung calon wali kota dan wakil wali kota di Bandar Lampung tahun 2020 :

Tabel 3. Nama Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung dalam Pilkada Serentak Tahun 2020

No	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Partai Pengusung	Jumlah Kursi
1.	Rycko Menoza dan Johan Sulaiman	01	Partai Golkar (6 Kursi) dan PKS (6 Kursi)	12 Kursi
2.	M. Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo W	02	Partai Demokrat (5 Kursi), PAN (6 Kursi), PKB (3 Kursi), Perindo (2 Kursi) dan PPP (1 Kursi)	17 Kursi
3.	Eva Dwiana dan. Deddy Amarullah	03	PDI Perjuangan (9 Kursi), Partai NasDem (5 Kursi) dan Gerindra (7 Kursi)	21Kursi

Sumber :KPU Bandar Lampung (2020)

Berdasarkan Tabel 3. Nama Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 menunjukkan semua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota maju mencalonkan diri melalui partai politik dan tidak ada paslon yang maju melalui jalur perseorangan. Peranan partai politik memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai alat penguasaan jabatan publik melainkan keberadaan parpol merupakan sebuah keniscayaan demokrasi dan dipandang sebagai institusi utama dalam melakukan maksimalisasi fungsi partai politik seperti artikulasi maupun agregasi kepentingan, rekrutmen politik serta komunikasi dan sosialisasi politik (Gunawan dkk, 2020:56).

Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1 Rycko dan Johan diusung oleh dua partai politik yaitu Partai Golkar dan PKS, Paslon nomor urut 2 Yusuf dan Tulus diusung oleh lima partai politik yaitu Partai Demokrat, PAN, PKB,

Perindo dan PPP dan Paslon nomor urut 3 Eva dan Deddy diusung oleh tiga partai politik yaitu PDI Perjuangan, NasDem dan Gerindra. Penelitian ini memfokuskan mengenai koalisi partai politik yang terbentuk dalam mengusung pasang calon dan strategi pemenangan yang dilakukan oleh partai politik pengusung.

Koalisi partai politik di Indonesia tidak kaku atau dapat dikatakan cair, hal ini dikarenakan “partai politik mencari persamaan tujuan dalam koalisi untuk memperoleh kekuasaan melalui cara yang dianggap demokratis yaitu pemilu” (Wospakrik, 2016:159). Adapun keuntungan dan manfaat koalisi partai politik dalam proses pemilihan kepala daerah “bisa terhindarnya konflik sesama partai politik itu sendiri dan bisa memaksimalkan calon kepala daerah yang diusung oleh partai dalam pemilihan umum” (Abdar, 2018:53). Namun disisi lain Firman Noor (2018) menyatakan bahwa peran jaringan non-partai lebih kuat dari pada partai politik dalam pemilihan umum dan cara pragmatis yang mendominasi dalam menentukan koalisi yang mengesampingkan ideologi partai politik.

Pembentukan koalisi merupakan aspek penting dalam pilkada, seperti Pilkada di Jawa Tengah tahun 2015 menunjukkan bahwa ideologi maupun pragmatisme memainkan peranan penting sebagai pertimbangan dalam pembentukan koalisi (Makhasin, 2016:248). Berdasarkan hasil hitung suara pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwakot) Bandar Lampung tahun 2020 Pasangan calon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah memperoleh suara tertinggi dibandingkan dua pasangan calon lainnya. Berikut tabel hasil suara pilwakot Bandar Lampung :

Tabel 4. Hasil Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020

No	Nama Pasangan Calon	Persentase Hasil Suara
1	Rycko Menoza dan Johan Sulaiman	21,3%
2	M. Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo W	21,4%
3	Eva Dwiana dan Deddy Amarullah	57,3%

Sumber : KPU Bandar Lampung (2020)

Berdasarkan tabel 4. Hasil Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 pada tanggal 21 Desember 2020 menunjukkan bahwa Pasangan calon nomor urut 3 Eva Dwiana dan Deddy Amarullah memperoleh suara 57,3% lebih unggul dibandingkan dua pasangan calon lainnya.

Penelitian ini memfokuskan pada pasangan calon nomor 3 yaitu Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dengan alasan pasangan calon tersebut diusung oleh tiga partai politik yang mempunyai kursi rata-rata terbanyak di parlemen, PDI Perjuangan dengan 9 kursi, Gerindra 7 kursi dan NasDem 5 kursi. Alasan lain memilih paslon tersebut karena berdasarkan hasil suara pada Pilkada Kota Bandar Lampung pasangan tersebut unggul dengan persentase 57,3% suara. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana bentuk koalisi partai pengusung dan strategi kemenangan yang digunakan partai politik dan tim kemenangan dalam memenangkan paslon nomor urut tiga tersebut.

Perilaku partai politik di Lampung dalam berkoalisi tidak konsisten dari satu arena pilkada ke arena pilkada yang lain. Ideologi dan program partai tidak menjadi basis perilaku koalisi partai di arena pilkada. Partai bersikap *permissive* alias serba boleh dan perilaku partai politik ini lebih menonjolkan asas pragmatism transaksional (Hertanto & Sulaiman, 2013:28). Cara-cara pragmatis yang digunakan partai politik dalam menentukan koalisi dan pasangan calon dalam pilkada disebabkan karena tujuan partai politik ikut dalam kontestasi hanya berorientasi pada kemenangan untuk memperoleh kekuasaan (Ekowati, 2019:16).

Beberapa penelitian yang sejenis sebagai bahan referensi dalam penelitian ini yakni Purba (2012) dengan judul Pola Koalisi Partai Berbasis Islam Pada Kasus Proses Rekrutmen Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2010-2015 menggunakan teori pola koalisi partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi partai politik yang cenderung sifatnya pragmatis dan transaksional. Penelitian lainnya yaitu Setyadi (2017) dengan judul

Strategi Koalisi Partai terhadap Pemenangan Haris-Zardewan dalam Pilkada Kabupaten Pelalawan tahun 2015, teori yang digunakan adalah koalisi *Minimal Winning Coalition* (MWC) dari William Riker. Hasil penelitian menunjukkan Koalisi partai sangat menentukan kemenangan pasangan calon karena koalisi partai mampu menggerakkan mesin partai.

Terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan tersebut yaitu dari teori yang digunakan, penelitian Purba (2012) menggunakan teori pola koalisi partai politik, Setyadi (2017) menggunakan koalisi *Minimal Winning Coalition* (MWC) dari William Riker. Penelitian Baleri (2017) dengan judul Strategi Pemenangan Herman HN-Yusuf Kohar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung periode 2016-2021 menggunakan teori Firmanzah (2008) mengenai tujuh indikator terkait strategi pemenangan, Putri (2019) dengan judul Analisis Motif Koalisi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 menggunakan Abraham De Swaan (1973) tentang koalisi ideologis serta Kart dan Mair tentang koalisi pragmatis.

Penelitian Syukri & Meilandi (2018) dalam judul Strategi Partai Koalisi dalam Pemenangan AW Nofiadi Mawardi-Ilyas Panji Alam Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 yaitu menggunakan teori Koalisi partai politik dari Arend Lijphard, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Hendrawan dkk (2020) mengenai pembentukan koalisi partai politik. Strategi politiknya Syukri & Meilandi (2018) sama seperti Gunawan, dkk (2020) yaitu menggunakan teori strategi politik Peter Schroder, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori strategi dari Kotten dalam Efriza (2012).

Berdasarkan penjelasan dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya mengenai partai politik yang bersifat pragmatis dalam pilkada. Namun, penelitian ini mempunyai perbedaan dalam hal menganalisis fenomena partai politik dalam membentuk koalisi dan menentukan calon yang diusungkan. Penelitian ini akan menganalisis

fenomena ideologi partai politik dan mahar politik dalam penentuan kandidat yang akan dicalonkan oleh parpol. Penelitian ini mengangkat judul “Strategi Partai Koalisi dalam Pemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dilatarbelakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses partai politik koalisi pasangan calon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah terbentuk?
2. Bagaimana srategi kemenangan disusun dan diimplementasikan oleh Eva Dwiana dan Deddy Amarullah pada Pilwakot tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses partai politik koalisi pasangan calon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah terbentuk.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis srategi kemenangan disusun dan diimplementasikan oleh Eva Dwiana dan Deddy Amarullah pada Pilwakot tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini sebagai referensi tambahan dalam ilmu politik mengenai koalisi partai politik dan strategi dalam pilkada. Partai politik dalam pemilihan kepala daerah berperan sebagai agen. Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam merekomendasikan calon dalam pilkada menunjukkan desentralisasi sebagai syarat demokrasi tidak berlaku dalam partai politik.

Ideologi partai tidak berpengaruh secara signifikan dalam penentuan koalisi dan partai cenderung bersifat pragmatis. Organisasi non-formal mempunyai peran penting dibandingkan dengan struktur partai politik dalam kemenangan kandidat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi politik lokal dan otonomi daerah sebagai bahan rujukan mengenai koalisi partai politik dan untuk menyusun strategi pemenangan bagi kandidat yang berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Partai Politik

2.1.1 Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik didalam sebuah negara. Untuk memahaminya, beberapa ahli menyatakan pendapat tentang pengertian partai politik. Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Labolo and Ilham 2015).

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan (Budiardjo 2015).

Edmun Burke mendefinisikan partai politik sebagai satu kesatuan struktur organisasi yang bertujuan untuk menyebarluaskan usaha-usaha yang telah menjadi kesepakatan diantara mereka untuk kepentingan nasional. Sedangkan Ware (1995:5) menyatakan bahwa partai politik merupakan sebuah lembaga yang mempengaruhi negara dengan cara menguasai jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan (Ridho 2013).

Partai politik menurut Giovanni Sartori adalah “suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik” (Budiardjo, 2015:404). Menurut Firmanzah (2018:44) “partai politik adalah institusi yang dianggap penting dan sine qua non dalam sistem demokrasi modern”. Partai politik (Parpol) memainkan peran sentral dalam menjaga pluralisme ekspresi politik dan menjamin adanya partisipasi politik, sekaligus juga persaingan politik.

Pendapat lainnya mengenai partai politik juga disampaikan oleh Efriza & Indrawan (2019:207) adalah “organisasi yang bertujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan”. Kata organisasi dan kekuasaan akan sangat mendominasi eksistensi dari sebuah parpol. Parpol tidak akan bisa merebut dan mendapatkan kekuasaan jika tidak bersifat kelompok (hanya individu) dan sebuah organisasi bukanlah parpol jika tujuan hidupnya bukan untuk kekuasaan.

Partai politik sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut (Firmanzah, 2018:67). Secara teoritis, partai politik adalah pihak yang paling berwenang dan bertanggung jawab terhadap rekrutmen elite politik, khususnya dalam menyeleksi orang-orang yang dinilai paling sesuai dengan ideologi dan kepentingan partai politik untuk menduduki jabatan-jabatan politik tertentu (Darmastuti 2020).

Berdasarkan buku *Good Party Governance* yang ditulis oleh Warjio et al., (2021) partai politik merupakan sekelompok orang yang mempunyai pikiran yang sama dengan kekuasaan sebagai fokus utamanya. Partai politik adalah asosiasi orang-orang dengan ide ataupun kepercayaan politik yang sama dengan tujuan untuk menangkap alat-alat pemerintah

serta mempengaruhi pembuatan kebijakan dengan membuat anggota mereka terpilih untuk menjadi berkuasa.

2.1.2 Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik di tiap negara demokrasi cukup penting, Katz Katz & Crotty (2014) mengungkapkan bahwa fungsi partai politik terbagi atas : *Coordination, Contesting Election, Recruitmen dan Representation*. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 11 partai politik mempunyai fungsi sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggota masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat
- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
- d. Partisipasi politik bagi rakyat Indonesia
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Menurut Russel J Dalton dan Martin P. Wattenberg membagi fungsi partai menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut :

- a. Partai di elektorat

Pada bagian ini fungsi partai menunjuk pada penampilan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi. Terdapat empat fungsi partai yang termasuk dalam fungsi partai dielektorat yakni menyederhanakan pilihan bagi pemilih, pendidikan warga negara, membangkitkan symbol identifikasi dan loyalitas dan mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi.

b. Partai sebagai Organisasi

Pada fungsi ini menunjuk pada fungsi-fungsi yang melibatkan partai sebagai organisasi politik atau proses-proses didalam organisasi partai itu sendiri. Pada bagian ini partai politik memiliki empat fungsi yakni rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari pejabat pemerintahan, pelatihan elite politik, pengartikulasian kepentingan politik dan agregasi kepentingan politik.

c. Partai di Pemerintahan

Pada arena ini, partai bermain dalam pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan pemerintahan. Partai telah identik dengan sejumlah aspek kunci proses demokratik. Terdapat tujuh fungsi utama yakni menciptakan mayoritas pemerintahan, pengorganisasian pemerintahan, implementasi tujuan kebijakan, mengorganisasikan ketidaksepakatan dengan oposisi, menjamin tanggung jawab tindakan pemerintah, kontrol terhadap administrasi pemerintahan dan memperkuat stabilitas pemerintahan.

Sementara itu, David McKay juga menjelaskan fungsi lain dari partai politik sebagai berikut (Jurdi, 2014:141):

a. Agregasi Kepentingan

Fungsi ini adalah posisi partai sebagai alat untuk mempromosikan serta mempertahankan kepentingan dari kelompok-kelompok sosial yang ada.

b. Memperdamaikan Kelompok dalam Masyarakat

Fungsi ini adalah fungsi partai politik untuk membantu memperdamaikan aneka kepentingan yang saling bersaing dan berkonflik dari masyarakat, dengan menyediakan platform penyelesaian yang seragam dan disepakati bersama.

c. *Staffing Government*

Fungsi ini adalah posisi partai politik untuk mengajukan orang-orang yang akan menjadi pejabat publik, baik baru maupun menggantikan yang lama.

d. Mengkoordinasi Lembaga-lembaga Pemerintah

Fungsi ini adalah posisi partai politik mengkoordinasi aneka lembaga pemerintah yang saling berbeda untuk tetap memperhatikan kepentingan politik publik.

e. Mempromosikan Stabilitas Politik

Fungsi ini adalah fungsi partai politik untuk mempromosikan stabilitas politik, meminimalisir konflik dengan menyaring informasi-informasi yang memunculkan potensi konflik.

2.2 Koalisi Partai Politik

2.2.1 Pengertian Koalisi

Koalisi adalah persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, dimana dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berasas manfaat. Dalam pemerintahan dengan sistem parlementer, sebuah pemerintahan koalisi adalah sebuah pemerintahan yang tersusun dari koalisi beberapa partai. Dalam teori, koalisi partai hanya akan berjalan jika dibangun dengan pemikiran yang realistis dan rasional yang dapat dilakukan kedua pihak. Teori koalisi tidak terlepas dari adanya kepentingan elit dibelakangnya (Akbar 2018).

Koalisi merupakan pembentukan kelompok para aktor politik pesaing untuk dibawa melalui persepsi ancaman maupun sebuah pengakuan bahwa tujuan tidak dapat dicapai tanpa bekerjasama (Heywood,2000). Menurut Lijphart (1995:221) koalisi merupakan “gabungan dua partai atau lebih yang bertujuan untuk membentuk secara bersama satu pemerintahan”. Koalisi merupakan suatu keniscayaan yang tak bisa dihindari dalam proses bangsa yang menganut sistem multipartai.

Tujuan utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasar

ideologi tertentu, maka untuk merealisasikan program-program tersebut partai politik saling berinteraksi satu dengan yang lain dalam suatu sistem kepartaian (Agustino, 2020:147). Pembentukan koalisi dilakukan aktor-aktor politik dengan sistem tawar menawar untuk menciptakan kemungkinan kontrak politik tentang proses pembentukan koalisi maupun keputusan kerjasama (Pamungkas 2011a).

Salvatore (2014:12) menyatakan bahwa koalisi politik terjadi dalam tiga bentuk, yaitu : Pertama, koalisi pemilu, artinya kerjasama dimana partai-partai politik sepakat untuk tidak bersaing satu sama lain dengan tujuan memaksimalkan keterwakilan gabungan mereka. Kedua, koalisi legislative yaitu kesepakatan antara dua atau lebih partai untuk mendukung undang-undang atau program tertentu. Ketiga, koalisi pemerintahan yaitu koalisi formal antara dua atau lebih partai yang berujung pada pembagian kursi kabinet lintas partai. Bentuk koalisi yang terkenal adalah grand coalition, dimana semua partai besar bergabung dalam pemerintahan.

Kepentingan elit yang bermain dalam menentukan arah koalisi ini menyebabkan terkadang tidak dapat dijabarkan ditingkatan bawah (konstituen). Suatu koalisi harus menyusun strategi yang sesuai dengan aktivitas para aktor dan partner koalisi. Koalisi politik tidak didasarkan pada tujuan-tujuan yang bersifat material melainkan tujuan-tujuan yang bersifat politis (Akbar 2018).

Kecendrungan umum dalam pemilu adalah terbentuknya koalisi partai-partai politik untuk mengusung kandidat. Landasan koalisi salah satunya dapat berupa faktor teknis, karena kurang memenuhi syarat untuk dapat mengajukan kandidat sendiri. Adapun manfaat koalisi partai politik yaitu bisa mempermudah mencapai tujuan yang diinginkan, menciptakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain, memperoleh suara yang signifikan dan bisa memenangkan pertarungan

dalam pemilu dan membentuk pemerintahan yang kuat dan tahan lama (Fauziah 2016).

Sistem parlementer, tidak ada partai yang mayoritas maka pembentukan pemerintahan atau kabinet hanya dapat melalui koalisi diantara partai-partai yang ada. Sedangkan pada presidensialisme terjadi pada saat koalisi partai juga bukan sesuatu yang sulit. Studi mengenai koalisi sangat dibutuhkan agar memahami keterikatan para aktor politik dalam membangun suatu kolektivitas dengan mencari alasan tindakan tersebut dilakukan, cara pembentukan kerjasama pertimbangan dan berbagi sumber daya yang dimiliki (Pamungkas 2011a).

2.2.2 Sumber Daya Koalisi Partai Politik

Studi mengenai koalisi menempatkan besaran kekuatan partai (*Size of party power*) sebagai sumber daya penentu asal mula koalisi partai terbentuk. *A theory of coalition in the triad* terdapat Theodore caplow yang membuat simulasi kemungkinan koalisi dengan tiga kekuatan (triad) yang berbeda. Kekuatan tersebut dibangun dengan asumsi yakni Pertama, anggota triad memiliki kekuatan yang berbeda.

Anggota yang memiliki kekuatan lebih akan mengontrol anggota yang lemah. Kedua, setiap anggota triad mencari kontrol atas anggota yang lain. Ketiga, kekuatan koalisi adalah setara dengan jumlah kekuatan dari dua anggota. Keempat, formasi koalisi berlangsung dalam situasi triadic maka akan terdapat suatu kondisi pra-koalisi dimasing-masing triad (Pamungkas 2011a).

Sementara itu, Gamson seperti dikutip Pamungkas (2011) menyatakan bahwa terdapat empat argument teoritikal bagi terbentuknya sebuah koalisi. Pertama teori sumber daya minimum (*minimum resource theory*). Teori ini membawa penekanan terhadap sumber daya yang dibawa pemain koalisi. Kedua, teori kekuatan minimum (*minimum power*

theory). Teori ini memberi penekanan pada perbandingan kekuatan relatif pemain dari pada distribusi sumber daya yang dimiliki. Ketiga, teori antikompetisi menyatakan sikap tentang kompetisi dan tawar menawar, perbedaan personalitas dan faktor lainnya. Keempat, pilihan acak (*random choice*). Teori ini mengasumsikan bahwa banyak situasi koalisi yang tidak kondusif untuk dianalisis secara rasional.

2.2.3 Motif Koalisi

Tujuan koalisi akan dipengaruhi oleh jumlah partai dan tiap aktor koalisi mempunyai tujuan khusus. Koalisi dalam sistem dua partai berkaitan dengan situasi internal maupun eksternal yang membahayakan atau ketika dua partai menginginkan hal yang sama. Dalam sistem multipartai koalisi tidak diperlukan ketika ada satu partai yang memiliki suara mayoritas mutlak. Dalam beberapa kasus partai pemenang lebih memilih berkoalisi dengan partai lain untuk berbagi tanggung jawab. Dengan alasan bahwa koalisi didalam sistem multipartai memperkuat posisi partai diparlemen.

Fungsi koalisi adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Mementingkan satu hal, beberapa aktor menganggap kemenangan lebih berarti daripada lainnya dan apabila situasi tidak memberikan keuntungan maka dapat menarik diri. Menurut Hinckley seperti dikutip oleh Pamungkas (2011) terdapat tiga motif didalam suatu koalisi. Diasumsikan para aktor koalisi yaitu A, B dan C. Dengan sumber daya yang dimiliki $A > B$ dan $B > C$, tetapi penggabungan B dan C lebih besar daripada A. Tujuan koalisi diantara aktor tersebut yakni Pertama, mencari efisiensi biaya (*seek efficiency*) untuk keuntungan koalisi dengan bergabung dalam koalisi kekuatan minimum (*Minimum winning coalition*). Kedua, pemegang kontrol (*seek control*) dalam koalisi dengan bekerjasama atau bergabung dengan patner terlemah. Ketiga, mengamankan diri (*seek security*) dari beberapa situasi yaitu berkoalisi dengan pemegang sumberdaya terbesar.

2.2.4 Formasi Koalisi

Terdapat banyak macam dan derajatnya didalam koalisi antar partai. Secara garis besar dapat dibedakan menjadi koalisi jangka pendek atau sementara dan koalisi permanen. Koalisi sementara yang dilakukan secara terus menerus didalam beberapa periode maka kemungkinan dapat terjadi koalisi permanen. Koalisi secara vertikal diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu aliansi pada saat pemilihan, aliansi parlemen dan aliansi pemerintah.

Menurut Cipto (2000) seperti yang dikutip oleh Pamungkas (2011) teori koalisi menunjukkan bahwa tidak semua partai layak dijadikan anggota rekanan dalam membentuk kabinet koalisi. Menurut Lijphart terdapat enam model koalisi yaitu *minimal winning coalition*, *minimum size*, *bargaining proposition*, *minimal range*, *minimal connected winning*, dan *policy-viable coalition*.

2.3 Patronase, Pembayaran (*Pay-offs*) dan Koalisi Partai

Pembentukan koalisi elektoral lokal di Indonesia terdapat beberapa karakteristik (Hendrawan dkk, 2021). Pertama, negosiasi antara partai dan calon seringkali kontroversial. Para pihak sering kali mengalihkan dukungan mereka di akhir pembicaraan, atau terlibat dalam tawar-menawar di menit-menit terakhir dalam pendaftaran menjadi bakal calon mengenai pembayaran. Seringkali, partai politik akhirnya mengeluarkan surat dukungan untuk dua kandidat, terutama jika ada perselisihan antar faksi atau perbedaan antara pemimpin lokal dan nasional. Konflik semacam itu menghasilkan persimpangan ganda dan kebingungan administratif. Salah satu penyebab kekacauan ini adalah hubungan yang kompleks antara tingkat lokal dan nasional.

Kedua adalah pertimbangan elektabilitas kandidat. Ini menunjukkan bahwa setidaknya beberapa partai khawatir untuk mendukung kandidat yang menang,

yang pada gilirannya berarti mereka harus mengharapkan semacam keuntungan berkelanjutan setelah pemilihan. Penekanan pada kandidat yang mempunyai kekuasaan birokrasi pada kontrolnya atas aparat pemerintah hanyalah salah satu contoh bagaimana para kandidat memuji kehebatan elektoral mereka. Ketiga adalah mengenai *Pay-offs* yang umumnya dibayarkan kandidat kepada partai untuk mendapatkan dukungan partai.

Aspinall & Berenschot (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemberlakuan pertama kali sistem pemilihan daerah yang langsung memiliki akibat yang dramatis. Pertama, praktik tersebut berarti bahwa partai-partai sekarang harus memilih para calon yang populer dimata rakyat. Kedua, meningkatnya marjinalisasi partai politik. Ketiga, adalah terdorongnya para calon untuk mengandalkan jejaring pribadi mereka sendiri ketika tiba saatnya masa untuk mempersiapkan pemilihan. Keempat, pilkada secara langsung ternyata mempersubur praktik jual beli suara dan bentuk-bentuk lain politik patronase dalam politik pemilihan umum atau menggeser lokusnya dari dalam institusi formal.

Fokus pada elektabilitas kandidat menunjukkan bahwa setidaknya beberapa partai ingin mendukung pemenang dan oleh karena itu, implikasinya mengamankan akses ke keuntungan jabatan. Di sisi lain, keunggulan pembayaran tunai menunjukkan bahwa partai lebih menghargai penghargaan langsung daripada manfaat tidak pasti yang mungkin diperoleh setelah pemilu. Selain itu, para pemimpin nasional tampaknya lebih menyukai koalisi dengan partai-partai yang bersekutu secara nasional, sementara pemimpin lokal tidak memiliki preferensi semacam itu.

Ward Berenschot mengungkapkan bahwa peran uang didalam politik Indonesia sangat kuat, dengan tidak menggunakan kata uang melainkan dengan istilah “koper” terdapat perubahan cukup menarik yaitu perubahan dalam arti sebelumnya uang ini dianggap sebagai sesuatu yang final bahwa sebuah partai politik akan mengusung calon kepala daerah setelah menerima sejumlah uang

dan kemudian setelah itu tanpa perjanjian apapun, akan tetapi kini telah berubah tidak hanya uang yang menjadi alasan sebuah parpol untuk mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah tetapi dengan janji-janji atau kontrak bisnis yang akan diperoleh oknum parpol setelah calonnya menang. Sehingga, pada akhirnya banyak proyek pembangunan di daerah yang hanya sekedar asal jadi karena mengejar keuntungan politik dan bisnis yang lebih diutamakan (Indonesia, 2021).

Koalisi partai politik yang mendukung calon baik dalam Pilkada maupun Pilgub hal tersebut merupakan hal spesifik di sistem electoral di Indonesia yang menarik yaitu pertama bagaimana calon mengumpulkan koalisi parpol, kedua yaitu apakah alasan parpol untuk mendukung calonnya dan terakhir bagaimanakah polanya?. Dalam penelitian Hendrawan dkk, (2021) terdapat empat hipotesis yaitu pertama mengenai ideologi (ideologi calon maupun ideologi parpol lain). Kedua, politik nasional (koalisi parpol ditingkat nasional maka parpol akan menjalankan koalisi yang sama ditingkat lokal (Provinsi/Kabupaten). Ketiga, patronase (akses kekayaan negara, calon bisa membantu parpol dengan kontrak bisnis ataupun posisi jabatan di birokrasi). Keempat, Pembayaran yang artinya parpol mencari uang dengan mengusung calon.

Hasil penelitian Hendrawan dkk (2021) menunjukkan bahwa dalam lima pilkada terdapat dua hal penting yaitu banyaknya jumlah calon dari tahun 2005-2014 dengan persyaratan 20% untuk menjadi calon pada tahun 2014 dan 2017 jumlah calon menurun. Di sisi lain, sangat minim jumlah kursi partai politik yang mendukung calon dan ada kecenderungan mencari mahar politik. Koalisi partai politik dengan memperhatikan faktor ideologi tidak memiliki dampak yang signifikan. Partai Islam akan dengan senang hati berkoalisi dengan partai sekuler dan begitupun sebaliknya, tidak ada data statistik yang signifikan dari latar belakang ideologis partai. Hal menarik yaitu dua partai akan sering berkoalisi ditingkat nasional dan ada kecenderungan lebih sering berkoalisi ditingkat bawah di Indonesia (Bravos Radio Indonesia 2021)

Penelitian Hendrawan dkk (2021) menyimpulkan bahwa dari pemilu tahun 2005-2014 parpol menyeleksi calon tidak berdasarkan ideologi tetapi mahar politik. Pada tahun 2014 mahar politik penting tetapi indikasi menjadi pragmatis mendapat kekayaan negara dengan sistem electoral di Indonesia calon tidak bisa menjamin kepada parpol apabila terpilih dan menang dalam pilkada tidak bisa menjamin membantu parpol.

Disistem electoral Indonesia, calon ditingkat lokal yang terpilih menjadi kepala daerah tidak bisa memberikan posisi atau jabatan tertentu, berbeda dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang bisa memberikan posisi atau jabatan dalam kabinetnya yaitu menjadi menteri, hal tersebut berbeda ditingkat lokal yang apabila terpilih maka kepala daerah tersebut tidak bisa memberikan jaminan posisi atau jabatan dipemerintahannya (Bravos Radio Indonesia 2021).

2.3.1 Efek Ideologi dan Koalisi Nasional

Hasil penelitian Hendrawan dkk (2021) menyatakan bahwa partai politik cenderung tidak terlibat dalam koalisi dengan partai-partai secara ideologis. Selama 2010-2013, partai islam mengalami penurunan 12% peluang untuk membentuk koalisi dengan partai islam lainnya. Demikian pula, partai-partai nasionalis ternyata tidak memiliki preferensi khusus untuk masing-masing lainnya dalam siklus pemilihan umum. Ideologi tidak berperan signifikan dalam pembentukan koalisi dalam pemilihan lokal di Indonesia. Partai politik memperlihatkan "*promiscuity*" ideologi yang cukup besar pada saat membentuk koalisi electoral (Slater, D., Simmons 2013).

2.3.2 Manfaat patronase jangka panjang versus jangka pendek

Untuk mengeksplorasi lebih lanjut apakah dan jenis pencarian manfaat apa yang memotivasi pembentukan koalisi yaitu dengan bergerak melampaui diad partai. Bagian ini mengidentifikasi apakah pihak-pihak terutama didorong oleh pembayaran moneter jangka pendek, atau oleh manfaat jangka panjang.

Sebelum 2014, sebagian besar koalisi yang dibentuk oleh kandidat menguasai di bawah 25 persen kursi di legislatif lokal yaitu tepat di atas batas minimum pencalonan yang disyaratkan oleh undang-undang (15% pada 2005-2009, 20% pada 2010-2014). Memang, banyak koalisi menguasai kurang dari jumlah minimum kursi yang disyaratkan di badan legislatif, karena setidaknya sebagian terdiri dari partai-partai pemegang kursi tanpa kursi yang memenuhi persyaratan pencalonan dengan mengumpulkan bagian suara mereka.

Partai politik rata-rata menghindari koalisi yang terlalu besar di mana kandidat tidak memiliki insentif untuk memberi mereka imbalan moneter (tetapi dengan kecenderungan menuju koalisi yang lebih besar dari waktu ke waktu). Temuan penelitian Hendrawan dkk (2021) menunjukkan volatilitas yang relatif tinggi dalam dukungan partai, sekitar setengah dari partai yang mendukung calon pemenang dalam pemilihan pertama mendukung calon pesaing pada pemilihan berikutnya.

Hubungan antara kepala daerah dan partai pendukung relatif lemah, dan sering putus. Salah satu penjelasannya adalah bahwa petahana (*incumbent*) mengarahkan sumber daya negara yang relatif sedikit ke partai-partai yang mendukungnya. Akibatnya, partai tidak memiliki insentif untuk tetap loyal. Kandidat yang bukan petahana bahkan kurang berhasil dalam mempertahankan dukungan: hanya dalam sekitar sepertiga kasus sebuah partai memperbarui dukungannya ketika kandidat yang kalah mencalonkan diri untuk kedua kalinya.

Secara keseluruhan, sementara daya tahan koalisi pemilu yang terbatas konsisten dengan pencarian imbalan, kesenjangan dalam jangka waktu koalisi antara kandidat petahana dan non-petahana menunjukkan bahwa setidaknya beberapa partai memperoleh penghargaan dari jabatannya, dan mempertimbangkan prospek politik kandidat yang bervariasi.

Disisi lain, Hendrawan dkk (2021) menyimpulkan bahwa motivasi ideologis memiliki dampak yang kecil pada pembentukan koalisi subnasional. Partai-partai di Indonesia ditingkat subnasional sebagian besar tetapi tidak sepenuhnya beroperasi sebagai pencari bayaran. Perilaku mencari imbalan tampaknya telah mereda dari waktu kewaktu dan semakin berubah menjadi pencarian jabatan. Kandidat koalisi secara signifikan lebih besar dari 2015, dan proporsi kandidat dengan koalisi yang terlalu besar (yaitu lebih dari 50%) juga meningkat. Namun partai-partai di Indonesia sebagian besar gagal untuk mendorong akuntabilitas dan kinerja kebijakan di Pemerintah Daerah (Pemda).

2.4 Strategi

2.4.1 Pengertian Strategi

Strategi adalah pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Dalam strategi ini, setiap organisasi mempunyai strategi, walaupun tidak harus selalu efektif, sekalipun strategi itu tidak dirumuskan secara eksplisit. Sasaran organisasi (*organization goals*) merupakan komponen vital yang perlu diteliti dalam penyusunan strategi sebuah organisasi (Mahmud 2018).

Strategi itu sendiri selalu memiliki tujuan, yakni “kemenangan”. Kemenangan akan tetap menjadi fokus, baik tercermin dalam mandate, dalam perolehan tambahan suara, dalam sebuah kemenangan pemilu bagi kandidat atau dalam memperoleh suara mayoritas untuk pemberlakuan suatu peraturan atau kebijakan. Bagaimana kemenangan itu digunakan, itulah tujuan politik yang ada dibalik hasil yang muncul dipermukaan (Schroder 2013).

Dalam penyusunan strategi kita harus mengetahui siapa lawan dan siapa kawan, karena dalam politik apa saja bisa terjadi. Kunci dari suksesnya strategi itu adalah komitmen dan konsistensi, jika ingin memenangkan

pertempuran dalam konteks pilkada maka mempertimbangkan siapa yang akan kita hadapi (Kandati 2015). Menurut Salusu (2015:71) mendefinisikan strategi yaitu :

“Strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan”.

2.4.2 Tipe-tipe Strategi

Tipe-tipe strategi yang dikemukakan oleh Kotten dalam Salusu (2015:105) yaitu terdapat empat tipe. Adapun tipe-tipenya adalah sebagai berikut :

1) Strategi organisasi (*Corporate Strategy*)

Strategi organisasi berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Dalam tipe corporate strategi ini, strategi yang dihasilkan tidak terlepas dari visi, misi, suatu daerah atau organisasi. Visi misi menjadi hal yang sangat penting dalam proses dan upaya untuk memenangkan pilkada.

Visi dan misi disusun bersama sebagai program kerja yang akan dilaksanakan suatu Paslon jika terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Visi dan misi juga disebut sebagai pemikiran dari Paslon dan tim pemenangan yang kemudian ditawarkan kepada para pemilih, agar masyarakat bisa menilai sejauh mana calon pemimpinnya memiliki kemampuan dalam membangun suatu daerah (Apriani and Maharani 2019).

2) Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi ini berbicara tentang implikasi atau dampak, Strategi program ini lebih memberikan perhatian kepada implikasi-implikasi dari suatu program.

3) Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya yang dimaksud disini dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya yang digunakan sebagai strategi dalam pilkada.

4) Strategi Kelembagaan (*Institusional Strategy*)

Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi. Strategi kelembagaan merupakan suatu strategi yang menyangkut masalah aturan, Standar Operasional Prosedur, tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki oleh organisasi (Syukri and Meilandi 2018).

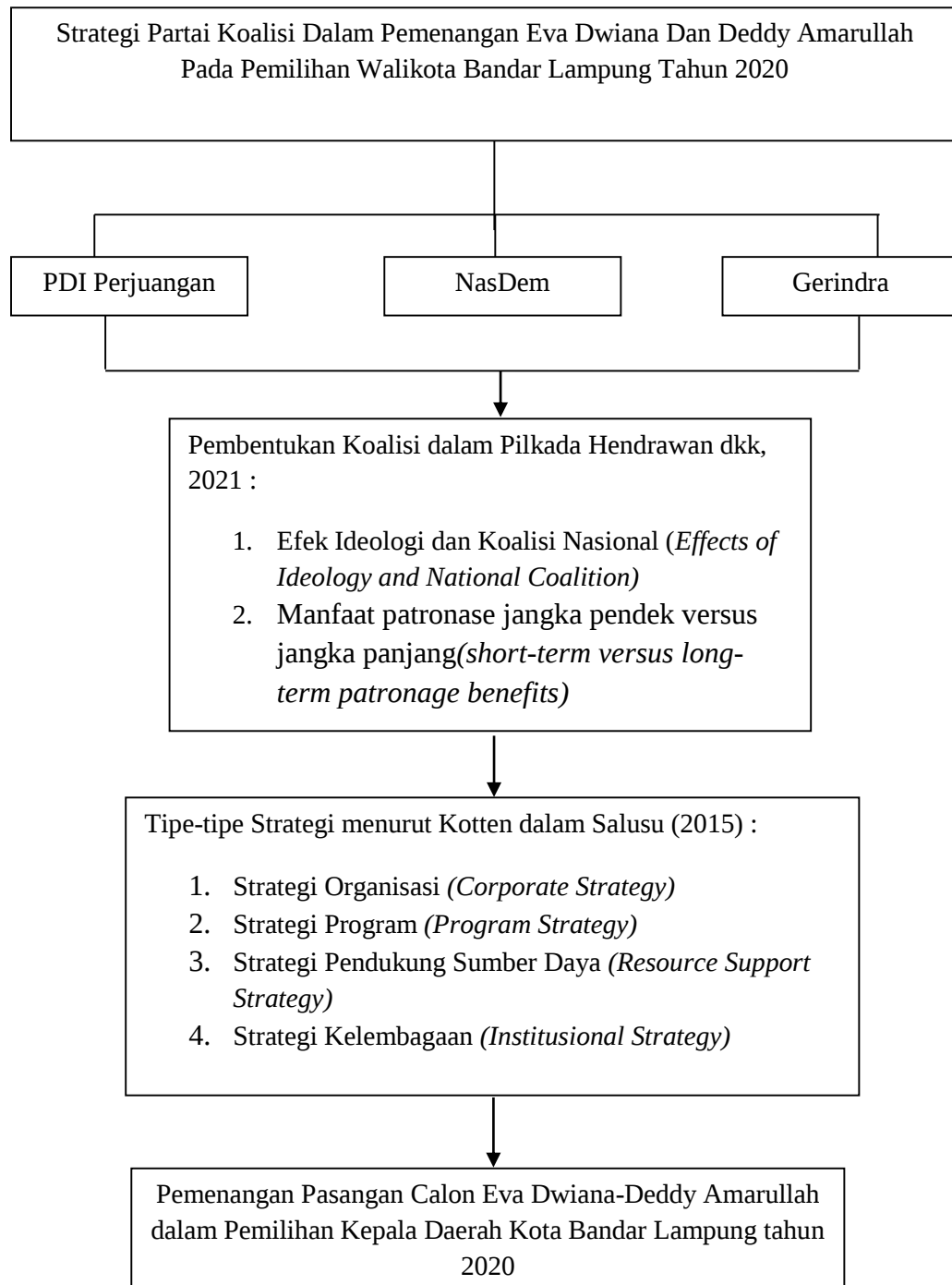
Kekuatan strategi ini terletak bagaimana organisasi tersebut dapat memanfaatkan semaksimal mungkin unsure-unsur kelembagaan yang dimilikinya untuk dapat mendukung Paslon dalam pilkada. Partai yang mengusung paslon memiliki standar operasional prosedur (SOP) tersendiri untuk memaksimalkan kelembagaan yang dimiliki agar dapat memenangkan paslon yang diusung (Apriani and Maharani 2019).

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian yang berjudul “Strategi Partai Koalisi dalam Pemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020” dengan mengidentifikasi objek penelitian terlebih dahulu. Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah partai-partai politik yang berkoalisi dalam mengusung Paslon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah Pada Pilwakot Bandar Lampung tahun 2020. Partai Politik yang mengusung Paslon Nomor Urut tiga tersebut adalah PDI Perjuangan, Partai NasDem dan Gerindra.

Penelitian ini menggunakan teori koalisi partai dan strategi. Teori pembentukan koalisi partai yang digunakan adalah dari Hendrawan dkk, (2021) untuk mengidentifikasi pembentukan koalisi Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam Pilwakot Bandar Lampung tahun 2020. Teori strategi yang digunakan yaitu teori strategi dari Kotten dalam Salusu (2015) yang terdiri dari Strategi organisasi (*Corporate Strategy*, Strategi Program (*Program Strategy*), Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*) dan Strategi Kelembagaan (*Institusional Strategy*)

Berikut bagan kerangka pikir penelitian ini :



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber : Diolah Peneliti, 2020

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang berjudul Strategi Partai Koalisi dalam Pemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong and Lexy 2014).

Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiarto, 2015:8). Burhan Bungin dalam Ibrahim (2015:52) juga mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah proses kerja penelitian yang sasarannya terbatas, namun kedalaman datanya tak terbatas, semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas hasil penelitian tersebut.

Penelitian kualitatif juga didefinisikan Bogdan dan Taylor dalam Moleong & Lexy (2017:4):

“sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh).

Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena fenomena yang diteliti mengenai koalisi partai dan strategi pemenangan Paslon nomor urut tiga yaitu Eva Dwiana dan Deddy Amarullah memerlukan data lapangan yang bersifat faktual melalui pengamatan yang bersifat mendalam karena pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Selain itu, penelitian ini membutuhkan informasi yang dapat diperoleh dengan metode wawancara. Melalui variabel-variabel yang ditemukan dan memungkinkan untuk mendapatkan kesimpulan dari objek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif untuk menjawab serta menggambarkan bagaimana Koalisi Partai Politik dan Strategi Pemenangan Paslon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung Tahun 2020. Dalam penelitian ini membutuhkan informasi yang didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumen yang hasil datanya tidak berupa data angka atau statistik.

3.2 Fokus Penelitian

Spradley mengemukakan bahwa fokus adalah domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (Sugiyono, 2016:208).

Penelitian ini memfokuskan pada strategi partai koalisi dalam pemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung Tahun 2020 dengan menggunakan teori dari Hendrawan dkk (2021) untuk mengidentifikasi pembentukan koalisi partai pengusung Eva Dwiana dan Deddy Amarullah. Serta Teori Strategi dari Kotten dalam Salusu (2015) untuk menganalisis strategi-strategi yang digunakan oleh paslon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam pemenangan Pilkada Bandar Lampung tahun 2020. Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan koalisi dalam pilkada dengan mengidentifikasi ideologi dan koalisi nasional, aktor-aktor pemrakarsa koalisi apakah dari calon, pengurus parpol atau pihak lain (broker, pengusaha dll) dan Pembayaran langsung dari para kandidat (*pay-off seeking*) serta manfaat patronase jangka pendek versus jangka panjang (*short-term versus long-term patronage benefits*);
2. Fokus penelitian dalam menganalisis strategi pemenangan adalah sebagai berikut :
 - a. Strategi organisasi (*Corporate Strategy*): Penggunaan Visi dan Misi
 - b. Strategi Program (*Program Strategy*) :Program unggulan yang ditawarkan Paslon
 - c. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*): Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi
 - d. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*): Aturan SOP yang berlaku dan ditetapkan bagi partai pengusung

3.3 Informan

Informan pada sebuah penelitian, dapat diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sehingga, informan tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal (Moleong and Lexy 2017).

Selain itu, dalam memahami kancah penelitian yang lebih aman, peneliti harus berpikir untuk menemukan sumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Selain itu peneliti juga memahami sumber data maupun kancah penelitian dengan *verstehen*. Dalam perspektif fenomenologis, *versthen* sangat diperlukan peneliti didalam kancah penelitian. *Verstehen* adalah cara memahami situasi yang ditemui dilapangan (Fuad dkk, 2014:9). Penelitian ini memfokuskan informan pada partai yang mengusung dan Tim sukses Paslon

Eva Dwiana dan Deddy Amarullah yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nasional Demokrat (NasDem) dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), pengamat politik. Partai Nonkoalisi, jurnalis, KPU Kota Bandar Lampung dan Bawaslu Kota Bandar Lampung. Berikut adalah informan yang akan di wawancarai :

Tabel 5. Informan Penelitian

No	Koding Informan	Jabatan dalam Instansi	Keterangan Informasi
1	INF 1	Blantik (<i>broker</i>)	Mahar Politik dalam Pilwakot Balam tahun 2020
2	INF 2	Pengurus partai koalisi	Mahar Politik dalam Pilwakot Balam tahun 2020
3	INF 3	Blantik (<i>broker</i>)	Mahar Politik dalam Pilwakot Balam tahun 2020
4	INF4	Pengurus PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung	Strategi Koalisi dan Strategi Pemenangan Eva & Deddy dalam Pilwakot 2020
5	INF5	Pengurus Partai NasDem Kota Bandar Lampung	Strategi Koalisi dan Strategi Pemenangan Eva & Deddy dalam Pilwakot 2020
6	INF6	Pengurus Partai Gerindra Kota Bandar Lampung	Strategi Koalisi dan Strategi Pemenangan Eva & Deddy dalam Pilwakot 2020
7	INF7	Pengamat Politik	Koalisi Partai Politik dalam Pilkada
8	INF8	Pengamat Politik	Koalisi Partai Politik dalam Pilkada
9	INF9	KPU Kota Bandar Lampung	Koalisi Partai Politik dalam Pilkada
10	INF10	Bawaslu Kota Bandar Lampung	Koalisi Partai Politik dalam Pilkada
11	INF11	Partai Golkar (Partai Nonkoalisi)	Koalisi Partai Politik dalam Pilkada
12	INF12	Partai Demokrat (Partai Nonkoalisi)	Koalisi Partai Politik dalam Pilkada
13	INF13	Jurnalis Tribun Lampung	Koalisi Partai Politik dalam Pilkada
14	INF14	LSM	Koalisi Partai Politik dalam Pilkada
15	INF15	Lawan Politik	Koalisi Partai Politik dalam Pilkada
16	INF16	Jurnalis Lampung Post	Koalisi Partai Politik dalam Pilkada
17	INF17	Tim Pemenangan	Teknis Kampanye Pasangan Eva dan Deddy

Sumber : Diolah Peneliti, 2021

Alasan memilih masing-masing Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem dan DPC Partai Gerindra Kota Bandar Lampung adalah karena posisi dan peran dalam partai yang lebih memahami mengenai keputusan dalam koalisi partai dalam pilwakot Kota Bandar Lampung tahun 2020.

Alasan memilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung karena sebagai penyelenggara dalam pilwakot Bandar Lampung yang mengetahui persyaratan partai politik dalam mengusung kandidat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandar Lampung sebagai pengawas dalam pilwakot Bandar Lampung yang mengetahui peraturan partai politik dalam mengusung kandidat di pilwakot Bandar Lampung.

Alasan memilih pengamat politik karena sebagai pihak yang netral dan ingin mengetahui sudut pandang pengamat politik mengenai partai politik yang berkoalisi dalam pilkada. Kemudian alasan memilih partai nonkoalisi untuk mendapatkan informasi terkait *pay-off seeking* yang tidak memungkinkan untuk didapatkan dari koalisi Eva Dwiana dan Deddy Amrullah. Jurnalis dijadikan informan dalam penelitian ini sebagai pihak yang netral dalam pilkada dan untuk mendapatkan data-data dari media terkait koalisi partai politik di Bandar Lampung. Dalam penelitian ini semua nama informan akan menggunakan anonimitas untuk menjaga kerahasiaan identitas diri narasumber karena informasi yang akan diperoleh bersifat sensitif.

3.4 Jenis dan Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian yang diperoleh melalui dua sumber data (Sugiyono, 2016: 225)

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang ditentukan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan

informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan. Saat menetapkan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam penelitian

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer berupa artikel-artikel yang didapat dari surat kabar, majalah, website, dan sebagainya. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa Undang-undang Pemilu, AD/ART masing-masing partai dan Surat Keputusan (SK) Partai terkait koalisi. Data sekunder digunakan untuk melengkapi atau mendukung data yang telah peneliti kumpulkan. Berikut dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai data sekunder :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Nomor : 1544/IN/DPP/VII/2020 tentang persetujuan pasangan calon walikota dan wakil walikota
- c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 07.892/B.1-KWK/DPP-Gerindra/2020 tentang persetujuan pasangan calon walikota dan wakil walikota
- d. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Nomor : 149-Kpts/DPP-NasDem/VIII/2020 tentang persetujuan pasangan calon walikota dan wakil walikota Bandar Lampung Provinsi Lampung dari Partai NasDem
- e. Form Model BB.2-KWK tentang daftar riwayat hidup calon walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2020
- f. Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 766.HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

- g. AD/ART Partai PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan NasDem
- h. SK Kepengurusan DPC PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai NasDem Kota Bandar Lampung
- i. Berita-berita dari media massa online berkaitan dengan koalisi partai politik di Bandar Lampung tahun 2020.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2018:38). Mc Milan dan Schumacher mengemukakan beberapa instrument untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif antara lain observasi partisipasan, observasi bidang/lapangan, wawancara mendalam dan dokumen dan artefak teknik tambahan seperti audio visual. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi (Suharsaputra 2014) sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2016:231). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data pada penelitian ini karena dengan melakukan wawancara dapat berinteraksi langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

Barakso, Sabet dan Schaffner (2014:193) mendefinisikan wawancara adalah

“interviewing is perhaps the core research methodology used in most small-n research. Interviews might be held with political leaders, social movement participant, civil servants. Or any variety of public and/or political actor”

Terkait penelitian ini, wawancara yang dilakukan meliputi wawancara semi-terstruktur (*semistructure interview*) atau wawancara *in depth interview*, yakni pelaksanaannya lebih bebas dan tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Wawancara mendalam merupakan suatu interaksi atau pembicaraan yang terjadi antara satu orang pewawancara dengan satu orang informan (Manzilati 2017).

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif (Satori and Komariah 2020). Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan pancra indra lainnya. Teknik observasi berguna untuk menjelaskan dan merinci gejala yang terjadi, dimaksud sebagai pengumpulan data selektif sesuai dengan pandangan peneliti (Bungin, 2015:135).

Pemilihan observasi dalam pengumpulan data pada penelitian ini untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan dalam proses wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Dengan dilakukannya observasi untuk mendapatkan data-data melalui pengamatan yang dilakukan diluar proses wawancara sebagai data tambahan di dalam data primer penelitian. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak terstruktur yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi dan mengembangkan pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi dilapangan (Bungin 2015).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017:219).

Alasan penelitian ini menggunakan dokumentasi dalam pengumpulan data sebagai bukti yang riil bahwa telah melakukan penelitian ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara yang telah dibuat dan observasi sehingga mendapatkan data atau jawaban yang diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan. Dokumentasi juga dapat berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang lama.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Editing Data

Tujuan dalam proses editing data adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sejauh mungkin (Narbuko & Achmadi, 2016: 153). Proses editing merupakan proses dimana peneliti melakukan proses pengecekan atau klarifikasi dari data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yaitu wawancara observasi dan dokumentasi di lapangan.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data pada penelitian ini yaitu melakukan pembahasan atau hasil dengan kata lain berarti menjelaskan dan menemukan makna hasil analisis dengan tujuan teoritis dan praktis penelitian (Silalahi,2012). Penelitian ini akan menjabarkan data yang ada melalui tahap editing kemudian diberikan penjelasan atau penafsiran serta dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sebagai bahan jawaban terhadap permasalahan penelitian (Hikmawati, 2017:193). Analisis data menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong & Lexy (2017: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, *display* (Penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut Miles. dkk (2014:16) yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari jika diperlukan.

2. Penyajian Data (*displaydata*)

Penyajian data dapat membantu dalam memahami apa yang terjadi di lapangan. Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah beragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas kedalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Proses teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dimulai dari melakukan peninjauan data primer dari hasil wawancara dan dianalisis dengan menggunakan teori koalisi untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mencapai tujuan penelitian ini. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis dan didukung dengan data sekunder penelitian. Setelah dianalisis, proses selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi. Pengolahan data dimulai dengan pencatatan data mentah kemudian dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian. Data dianalisis lalu diperiksa keabsahannya kemudian dibuat sebuah kesimpulan.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah ketepatan data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2016:246). Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan uji kredibilitas melalui triangulasi. Triangulasi dalam uji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang peneliti gunakan ialah yang dikembangkan oleh Denzim ada empat triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik serta teori (Moleong & J, 2017:331). Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Triangulasi sumber peneliti menggunakan berbagai sumber seperti Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, dokumen, arsip dan berita online.

2. Triangulasi metode yakni menggunakan metode seperti wawancara, observasi dan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara observasi dan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan yang berkaitan dengan koalisi partai politik strategi kemenangan Eva Dwiana dan Dedy Amarullah dalam Pilkada Bandar Lampung tahun 2020 serta pihak lain seperti pengamat politik, Jurnalis, Tim sukses, KPU dan Bawaslu Kota Bandar Lampung.

IV. GAMBARAN UMUM

Pada kajian sebelumnya, penulis telah memaparkan penggambaran dari koalisi partai politik dan strategi kemenangan. Kemudian, penulis juga sudah menjabarkan metodologi yang akan digunakan sebagai instrumen pada penelitian ini. Sehingga, pada pembahasan ini penulis akan memaparkan gambaran umum obyek penelitian, yakni terkait pelaksanaan pilkada Kota Bandar Lampung termasuk sejarah pilwakot di Bandar Lampung, para kandidat pilkada dan objek pada penelitian ini yaitu partai pengusung Eva Dwiana dan Deddy Amarullah yang terdiri dari PDIP, Partai Gerindra dan Partai NasDem dan Tim Pemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah pada Pilwakot Kota Bandar Lampung tahun 2020.

4.1 Sejarah Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung

Pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung dimulai di tahun 2005, di mana telah terjadi dua kali putaran pemilihan. Pertama, yakni tanggal 27 Juni 2005 dan putaran kedua yakni tanggal 6 Agustus 2005. Kondisi ini disebabkan mengingat tidak ada satupun pasangan calon yang memperoleh suara di atas 25%. Adapun pasangan yang ditandingkan kembali oleh KPU Kota Bandar Lampung yaitu pasangan Eddy Sutrisno-Kherlan dan pasangan Abdul Hakim Zainal Iskandar yang akhirnya dimenangkan oleh pasangan Eddy Sutrisno dan Kherlani (Sujatmiko 2016). Berikut daftar pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung tahun 2005:

Tabel 6. Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung tahun 2005

No	Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara
1	Sjachrazad dan Rudy Syawal	Partai Golkar	64.991
2	Nuril Hakim dan Zamzani Y	Partai Demokrat	49.344
3	Haryanti Syafirin dan Tarwo	Koalisi Partai B. Lampung Bersatu	16.876
4	Eddy Sutrisno dan Kherlani	PDIP, PBR, PDK, PBB	69.383
5	Irfan Nuranda dan Kuswandi	PPP dan PAN	38.128
6	Abdul Hakim dan Zainal	PKS	71.100

Sumber: Hadiawan, 2009.

Pilkada di Bandar Lampung selanjutnya diselenggarakan pada tahun 2010. Pilkada yang diselenggarakan tepatnya pada 30 Juni 2010 diikuti oleh enam pasangan calon. Pilkada tahun 2010 dimenangkan oleh pasangan calon Herman HN dan Tobroni dengan perolehan 122.883 suara. Berikut daftar nama pasangan calon peserta pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2010 :

Tabel 7. Daftar nama pasangan calon Pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2010

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara
1.	A. Sauki Shobier dan Syamsul Rizal	Calon Perseorangan (<i>Independent</i>)	6.618
2.	Herman HN dan Tobroni Harun	PDIP, PNBK, PBR, PKNU, PK, PBB, PNI MARHAENISME, PIS, PIB, BARNAS, Republikan, PDP, Patriot, Merdeka, PPD, Pakarpangan, PKPI, PPNUI, PSI, Pelopor, Partai Buruh	122.883
3.	Khaerlani dan Heru Sambodo	Golkar, Partai Hanura, PKB, PPRN, PMB, PKDI, PDS	107.133
4.	Eddy Sutrisno dan. Hantoni Hasan	Partai Demokrat, PKS, PPP, Partai Gerindra, PAN, PDK, PKPB, PPI	104.227
5.	Dhommiril Hakim YHS, dan Sugiato	Calon Perseorangan (<i>Independent</i>)	7.904
6.	Nurdiono dan Dian Kurnia Laratte	Calon Perseorangan (<i>Independent</i>)	10.026

Sumber : Sujatmiko, 2016.

Lima tahun berlalu, selanjutnya pilkada Kota Bandar Lampung diselenggarakan pada tahun 2015. Pilkada Bandar Lampung tahun 2015 diikuti oleh tiga pasangan calon yang maju melalui jalur independen maupun diusung oleh partai politik. Pilkada tahun 2015 dimenangkan oleh petahana (*Incumbent*) Herman HN namun dengan wakil yang berbeda dari periode sebelumnya yaitu Yusuf Kohar.

Berikut daftar nama pasangan calon yang mengikuti pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015 :

Tabel 8. Daftar Nama Pasangan Calon Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara
1.	M. Yunus dan Ahmad Muslimin	Non partai politik (jalur independen)	8.326
2.	Herman HN dan Yusuf Kohar	PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PKS, Gerindra, PKB dan NasDem	358.254
3.	Tobroni Harun dan Komarunizar	PAN, Hanura dan PKPI	46.804

Sumber : Sujatmiko, 2016.

Periode Kepemimpinan Herman HN dan Yusuf Kohar telah berlalu. Kota Bandar Lampung kembali menyelenggarakan Pilkada yaitu pada tahun 2020. Pilkada Bandar Lampung tahun 2020 diikuti oleh tiga pasangan calon yang maju melalui jalur partai politik, pilkada kali ini tidak ada pasangan calon yang maju melalui jalur independen. Kemenangan pilkada Kota Bandar Lampung diraih oleh Pasangan calon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah sesuai dengan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 766.HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

4.2 Profil Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2020

Sub bab ini, penulis akan menjabarkan profil singkat walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2020. Selain biodata singkat, sub bab ini juga akan menjabarkan visi dan misi walikota dan wakil walikota Bandar Lampung

tahun 2020 yang Penulis kutip dari form Model BB.2-KWK tentang daftar riwayat hidup calon walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2020 (Kpu-bandarlampungkota.go.id, 2020).

4.2.1 Profil Walikota Bandar Lampung tahun 2020

Walikota Bandar Lampung tahun 2020 adalah seorang perempuan pertama yang memimpin Kota Bandar Lampung yakni bernama Eva Dwiana. Eva Dwiana berumur 50 tahun dan berdomisili di Jl. Cut Nyak Dien No 74. Sebelum mencalonkan diri sebagai walikota, Eva Dwiana merupakan Anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024. Dilihat dari riwayat pendidikannya, pendidikan terakhir Eva Dwiana adalah Strata 2 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “YAPPANN” tahun masuk 2010 dan selesai pada tahun 2012.

Riwayat organisasi Eva Dwiana dimulai pada tahun 2014 dengan jabatan wakil ketua DPD PDI Perjuangan. Kemudian di tahun 2019 menjadi Ketua Majelis Taklim Rahmat Hidayat. Pada tahun 2015 Eva Dwiana menjabat sebagai ketua KONI Kota Bandar Lampung dan tahun 2016 sebagai Ketua Kwaran Pramuka Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, dimulai tahun 2010-2020 Eva Dwiana menjabat sebagai Ketua PKK Kota Bandar Lampung.

4.2.2 Profil Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020

Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 adalah Deddy Amarullah. Deddy Amarullah berumur 63 tahun dan merupakan pensiunan PNS. Domisili Deddy Amarullah yaitu di Jl. Gatot Subroto Gang Jarum Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung. Pendidikan terakhir Deddy adalah Strata 1 di Universitas UPN Veteran Yogyakarta mulai masuk tahun 1979 dan selesai pada tahun 1986.

Riwayat organisasi Deddy Amarullah yaitu pada tahun 2010 menjabat sebagai ketua PMI Kota Bandar Lampung, tahun 2016 sebagai ketua IPSI Kota Bandar Lampung, tahun 2018 sebagai Ketua Ikatan Pensiunan PNS

Kota Bandar Lampung, tahun 1990-1991 menjabat sebagai Kasubbag Perekonomian di Pemerintah Provinsi Lampung, tahun 1991-1997 menjabat sebagai Kasubbag Tata Hukum Pemerintah Provinsi Lampung, tahun 2005-2007 sebagai Kabag Sarana dan Prasarana Biro Humas Provinsi Lampung, tahun 2008-2009 menjabat sebagai Kabag Penegakan Hukum BNN Provinsi Lampung, tahun 2010-2017 menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan Kota Bandar Lampung, tahun 2004-2010 sebagai wakil ketua KPRI Saptawa Provinsi Lampung dan tahun 2017 sebagai Ketua KPRI Ragom Gawi Kota Bandar Lampung.

4.2.3 Visi, dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020.

1. Visi

Bandar Lampung sehat, cerdas, beriman, berbudaya, nyaman, unggul, berdaya saing berbasis ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik.
- b. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat. Membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama masyarakat.
- c. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial. Menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dalam rangka melayani

kebutuhan distribusi perekonomian dan pengembangan investasi serta kebutuhan sosial masyarakat.

- d. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif untuk kesejahteraan masyarakat.
- e. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religious, berbasis keluarga dengan berasaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.
- f. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri serta berkelanjutan dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain untuk mengembangkan produk-produk lokal hingga berdaya saing serta memberikan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang profesional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
- g. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan didukung oleh tingkat keamanan kota terpadu yang melibatkan kerjasama antara aparaturnya keamanan serta partisipasi masyarakat kota Bandar Lampung.

4.3 Koalisi Partai Politik Pengusung Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

Penulis dalam sub bahasan ini mendeskripsikan partai politik pengusung Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam Pilwakot Kota Bandar Lampung tahun 2020. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa partai pengusung adalah partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Partai pengusung Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam Pilwakot Bandar Lampung adalah PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai NasDem. Penulis menjabarkan ideologi partai, visi dan misi dari partai pengusung Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam Pilwakot Kota Bandar Lampung tahun 2020.

4.3.1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)

Berdasarkan AD/ART PDI Perjuangan No.9/Tap/Kongresiii/Pdi-P/2015, Pasal 5 Ayat 1, PDI Perjuangan adalah partai dengan ideologi yang dianut yakni “Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan jiwa dan semangat lahirnya pada 1 Juni 1945”. Kemudian, pada pasal 5 ayat 2 dalam Aturan Dasar PDI Perjuangan menyantumkan jati diri partai berupa “Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial” yang memperkuat posisinya sebagai kelanjutan partai Nasionalis-Marhaenisme.

Materi kaderisasi anggota partai yang dicantumkan pada Pasal 83 ayat (2) ART PDIP, terdiri dari lima pengajaran khusus ideologi yang bersifat

pendukung. Salah satu diantaranya yakni Marhaenisme sebagai teori perjuangan tahun 1965. Sehingga, tak heran bahwa PDIP kerap kali dikatakan sebagai partai warisan Nasionalis-Marhaenisme. Marhaenisme yaitu sosio- nasionalisme dan sosio-demokrasi. Marhaenisme adalah azas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri yang di dalam segala halnya menyelematkan marhaen. Jadi Marhaenisme bisa disimpulkan sebagai cara perjuangan dan azas yang menghendaki hilangnya tiap-tiap kapitalisme dan imperialism. (Kompasaina.com 2019).

a. Visi PDI Perjuangan

Visi partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Aturan Dasar Partai PDI Perjuangan adalah :

Partai adalah :

1. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan pancasila 1 Juni 1945;
2. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme dan sosio demmokrasi (Tri Sila);
3. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
4. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara dan
5. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran bung karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Misi PDI Perjuangan

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8,9 dan 10 anggaran dasar partai PDI Perjuangan.

Pasal 7 Partai mempunyai tujuan umum:

1. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
2. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pasal 8 Partai mempunyai tujuan khusus:

1. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
2. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
3. Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;
4. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan

5. Menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Pasal 9 Partai mempunyai fungsi:

1. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
2. Melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, LembagaLembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;
3. Membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
5. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan
6. Membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Pasal 10 Partai mempunyai tugas:

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;
3. Menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;
5. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
6. Mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
7. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;
8. Sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

c. Struktur Kepengurusan PDI Perjuangan

Adapun struktur kepengurusan PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung masa bakti 2019-2024 :

Tabel 9. Struktur Kepengurusan PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Wiyadi
2.	Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai	Hanafi Pulung
3.	Wakil Ketua Bidang Organisasi	Tunas Budi Cukito
4.	Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi	Wiwik Anggraini
5.	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu	Dedi Yuginta
6.	Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik	Fandi Tjandra
7.	Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan HAM	Endang Setyaningsih
8.	Wakil Ketua Bidang Maritim	Suheli
9.	Wakil Ketua Bidang Ekonomi	Febrian Sanusi
10.	Wakil Ketua Bidang Ekonomi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Adriawan Tirta
11.	Wakil Ketua Bidang Nelayan, Buruh dan Tani	Arianto
12.	Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak	Inge A. Mahendra
13.	Wakil Ketua Bidang Pemuda, Olahraga dan Komunitas Seni Budaya	Rakhmad Nafindra
14.	Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Ferly Wijaya
15.	Sekretaris	Melinda
16.	Wakil Ketua Bidang Internal	Agus Sulistyarini
17.	Wakil Ketua Bidang Eksternal	Citra Febrianti
18.	Bendahara	Ahmad Jares Mogni
19.	Wakil Bendahara	Sri Ningsih Djamsari

Sumber : SK DPP PDI Perjuangan (2019)

4.3.2 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Berdasarkan Anggaran Dasar (AD) Partai Gerindra tahun 2014, pasal 5 partai Gerindra berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jati diri partai Gerindra adalah kebangsaan, kerakyatan, religious dan keadilan sosial. Pasal 8 AD Partai Gerindra menyatakan bahwa watak partai Gerindra adalah demokratis, merdeka, pantang menyerah, berpendirian teguh, percaya kepada kekuatan sendiri dan kekuatan rakyat, terbuka dan taat hukum serta senantiasa berjuang untuk kepentingan rakyat.

Berkaitan dengan ideologi, partai Gerindra Sama halnya dengan Partai Nasdem yang menggunakan Pancasila sebagai ideologi, namun dengan tambahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai azaznya. Pembedanya adalah karakter yang dibawa oleh tokoh sentral partai. Publik sudah mengetahui bahwa tokoh sentral Partai Gerindra adalah anggota militer dari kalangan Kopassus, yang notabene juga merupakan bagian dari

entitas yang pernah berkuasa pada orde sebelumnya. Sehingga, partai terlihat sangat bergantung dengan tokohsentralnya (Sujatmiko 2016).

a. Visi Partai Gerindra

Visi Partai Gerindra adalah menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi (AD/ART Partai Gerindra Pasal 9).

b. Misi Partai Gerindra

Untuk mewujudkan visi tersebut, Partai Gerindra mengemban misi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain :

- (1) Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
- (2) Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
- (3) Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
- (4) Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di hadapan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan/atau latar belakang golongan.
- (5) Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah

untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih di setiap tingkat pemerintahan (AD/ART Partai Gerindra Pasal 9).

c. Tujuan Partai Gerindra

- (1) Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, secara murni dan konsekuen.
- (2) Berjuang untuk memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.
- (3) Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila, yang menjunjung tinggi kejujuran dan menghormati kebenaran, hukum dan keadilan.
- (5) Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui ekonomi kerakyatan dengan bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarah pada kedaulatan bangsa yang berdikari.
- (6) Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju, modern, sejahtera, kuat dan berdaulat (AD/ART Partai Gerindra Pasal 11).

d. Fungsi Partai Gerakan Indonesia Raya

- (1) Sarana pembentukan dan pembangunan karakter bangsa.
- (2) Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara.

- (3) Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
 - (4) Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat untuk membangun masyarakat Pancasila.
 - (5) Menghimpun persamaan sikap dan kehendak politik rakyat bersama dengan elemen bangsa lainnya untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - (6) Mempertahankan, mengemban, mengamalkan dan membela Pancasila.
 - (7) Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat.
 - (8) Menyiapkan kader-kader pemimpin politik bangsa dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas dan akseptabilitas dalam segala aspek kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (AD/ART Partai Gerindra Pasal 12).
- e. Struktur Kepengurusan Partai Gerakan Indonesia Raya

Adapun struktur kepengurusan Partai Gerindra Kota Bandar Lampung, sebagai berikut:

Tabel 10. Struktur Kepengurusan DPC Partai Gerindra Kota Bandar Lampung.

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Andika Wibawa S.R.
2	Wakil Ketua	Ahmad Riza
3	Wakil Ketua	Roy Dwi Suryono
4	Wakil Ketua	Ahmad Giri Akbar
5	Wakil Ketua	Macro Aulia
6	Wakil Ketua	Yayuk Rachmawati
7	Wakil Ketua	Yusni Aisah
8	Wakil Ketua	Halimah Tusadiah
9	Wakil Ketua	Retno Angraeni
10	Wakil Ketua	Darmawansyah
11	Sekretaris	Nasrullah Nawawi
12	Wakil Sekretaris	Zainuddin
13	Wakil Sekretaris	Abdullah Ido syahputra
14	Wakil Sekretaris	Jauhari

No	Jabatan	Nama
15	Wakil Sekretaris	Iswandy Kunang
16	Wakil Sekretaris	Devi Andriani
17	Wakil Sekretaris	Nofaridah
18	Wakil Sekretaris	Eli Gistiani
19	Wakil Sekretaris	Ariandi Taufik
20	Wakil Sekretaris	Alfian Ayub Khan
21	Wakil Sekretaris	Herly M. Zen
22	Bendahara	Imam Santoso
23	Wakil Bendahara	Didi Heriyanto
24	Wakil Bendahara	Febri Utama
25	Wakil Bendahara	Asih Sukesih
26	Wakil Bendahara	Erlinda

Sumber: SK (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (2017)

4.3.3 Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Berdasarkan AD/ART Partai NasDem pasal 2, Partai NasDem adalah sebuah partai politik di Indonesia berideologi Pancasila yang baru diresmikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 01 Februari 2011. Kongres I Partai NasDem yang digelar pada 25-6 Januari 2013 di Jakarta menjadi tonggak sejarah perjalanan Partai NasDem. Berbagai keputusan penting dikeluarkan dalam kongres ini. Satu di antaranya ialah memilih dan menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem periode 2013-2018 (Partainasdem.id 2013).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan NasDem sebagai satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta pemilu 2014. Sembilan partai lain yang mengikuti pemilu adalah Demokrat, PDI Perjuangan, Golkar, PKS, PAN, PKB, PPP, Gerindra dan Hanura (DetikNews 2013). Bahkan kemudian, Partai NasDem membuat sejarah mendapat nomor urut sebagai peserta pemilu 2014. Dengan telah ditetapkannya nomor urut partai peserta pemilu 2014, maka Partai NasDem yang bernomor urut 1 siap mengikuti pemilu 2014 untuk satu tekad mewujudkan gerakan perubahan melalui Restorasi Indonesia (Partainasdem.id 2013)

a. Visi Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.(AD/ART Partai Nasional Demokrat Pasal 4).

b. Misi Partai Nasional Demokrat.

- (1) Membangun Politik Demokratis Berkeadilan berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan konstitusi UUD 1945 (Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima) sebagai kontrak politik kebangsaan.
- (2) Menciptakan Demokrasi Ekonomi melalui tatanan demokrasi ekonomi maka tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara, termasuk di dalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita ini maka perlu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, sistem jaminan sosial nasional, penguatan industri nasional, serta mendorong kemandirian ekonomi di tingkat lokal.
- (3) Menjadikan Budaya Gotong Royong sebagai karakter bangsa. Dalam mewujudkan ini maka sistem yang menjamin terlaksananya sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan menjamin hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan yang menciptakan solidaritas dan soliditas nasional, sehingga seluruh rakyat Indonesia merasakan cita rasa sebagai sebuah

bangsa dan menjadikan gotong royong sebagai amalan hidup keseharian. Kebudayaan ini akan menciptakan karakter bangsa yang bermartabat dan menopang kesiapan Negara dalam kehidupan global. (AD/ART Partai Nasional Demokrat Pasal 5).

c. Tujuan Partai Nasional Demokrat

Partai NasDem bertujuan mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan dan berkedaulatan. (AD/ART Partai Nasional Demokrat Pasal 8)

d. Fungsi Partai Nasional Demokrat Dengan semangat kebangsaan Partai berfungsi untuk:

- (1) Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi.
- (3) Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis, partisipatif dan beradab.
- (4) Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip Demokrasi Ekonomi.
- (5) Menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum.
- (6) Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia.
- (7) Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial budaya yang egaliter berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. (AD/ART Partai Nasional Demokrat Pasal 9).

e. Struktur Kepengurusan Partai Nasional Demokrat

Adapun struktur kepengurusan Partai Nasdem Kota Bandar Lampung, sebagai berikut:

Tabel 11. Struktur Kepengurusan DPD Partai Nasdem Kota Bandar Lampung

I. DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH	
Ketua	Zan Iking
Anggota	Rusfian Razi
Anggota	Suwarno
Anggota	Asnimarasrina
II. DEWAN PAKAR DAERAH	
Ketua	Eddy.D. Saleh
Anggota	Junaidi Nasir
Anggota	Kurniati
Anggota	Tantin Priyanti
III. DEWAN PIMPINAN DAERAH	
Ketua	Naldi Rinara.S. Rizal
Wakil Ketua Bidang Pemilihan Umum	Nova Irawan
Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan & Kaderisasi	Fitra Alfarisi
Wakil Ketua Bidang Media & Komunikasi Publik	Apung Anhar
Wakil Ketua Bidang Pendidikan Politik & Kebudayaan	Muhammad Yosmin
Wakil Ketua Bidang Hukum, advokasi & HAM	Budi Kurniawan
Wakil Ketua Bidang Otonomi Daerah	Erika Novalia Sani
Wakil Ketua Bidang Pertanian & Maritim	Poltak Aritonang
Wakil Ketua Bidang Pengabdian & Pemberdayaan Masyarakat	Gilang Ramadhan
Wakil Ketua Bidang Energi, SDA & Lingkungan Hidup	Fitria Sari
Wakil Ketua Bidang Agama & Masyarakat Adat	Muhammad Ansori
Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Daerah	Sudibyo Putra
Wakil Ketua Bidang Ekonomi	Dafran Anggara
Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak	Dewi Anggraeni
Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan & Tenaga Kerja	Anggi Tantina
Wakil Ketua Bidang Olahraga, Pemuda & Mahasiswa	Habrin Trimadhika
Sekretaris	Ahmad Rizky F.
Wakil Sekretaris Bidang Kepengurusan, Keanggotaan & Kaderisasi	M. Ariansyah
Wakil Sekretaris Bidang Internal & Kesekretariatan	Putri Wijayanti
Wakil Sekretaris Bidang Renlitbang	Nusantara
Wakil Sekretaris Bidang Eksternal	Al Kindy Muqovva
Bendahara	Dini Maysuri
Wakil Bendahara Bidang Penggalangan Dana	Ida Feni Astari
Wakil Bendahara Bidang Pengolahan Aser	Ayu Mauliza

Sumber: SK DPP Partai NasDem (2017)

4.4 Tim Kampanye dan Penghubung Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

A. Ketua Tim Kampanye :

Nama Lengkap : Wiyadi
 Alamat : Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung
 Pekerjaan/jabatan : Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung
 Anggota :

1. Nama lengkap : Andika Wibawa
 Alamat : Bandar Lampung
 Pekerjaan/jabatan : Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung
2. Nama lengkap : Ahmad Risky
 Alamat : Bandar Lampung
 Pekerjaan/jabatan : Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung
3. Nama lengkap : Melinda
 Alamat : Bandar Lampung
 Pekerjaan/jabatan : Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung
4. Nama lengkap : Nasrullah Nawasi
 Alamat : Bandar Lampung
 Pekerjaan/jabatan : Sekretaris DPC Gerindra Kota Bandar Lampung

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu :

Nama : Yulius Arief
 Alamat : P. Griya Abdi Negara Blok A8 No. 5 RT.03 Sukabumi, Bandar Lampung
 Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : Sahroni
 Alamat : Dr. Harun III. No. 17 A, RT. 013 Kota Baru,
 Bandar Lampung
 Pekerjaan : Wiraswasta

4.5 Koalisi Partai Politik dalam Pilkada di Indonesia

Berdasarkan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dalam hal syarat bagi partai politik di Indonesia dalam mendaftarkan calon pada pemilihan umum yaitu telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah di daerah yang bersangkutan.

Apabila suatu partai politik belum memenuhi syarat dalam mencalonkan kepala daerah, partai politik tersebut dapat berkoalisi dengan partai politik lainnya. Dalam penelitiannya Abdar (2018) menyebutkan bahwa pilkada merupakan wadah untuk memilih pemimpin dalam menduduki sebuah jabatan di pemerintahan. Pilkada menjual profil pasangan calon, namun ini bukan berarti partai politik tidak memberikan peranannya. Tugas dan fungsi koalisi partai politik sebagai organisasi merupakan kendaraan politik dalam memfasilitasi kadernya untuk melakukan koalisi dengan partai lain.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 kemenangan paslon yang diusung oleh koalisi partai politik bagian dari strategi partai politik dalam melihat kesempatan atau kontrol politik terhadap lawan politiknya. Kemampuan koalisi partai politik dalam melakukan komunikasi dengan partai politik lainnya sebagai jembatan untuk menentukan kandidat yang akan dicalonkan dalam pilkada merupakan hal yang sangat penting.

Koalisi antara partai politik tidak ada yang ideal dan tidak ada satu pun koalisi yang digalang para elit menghasilkan paduan yang kuat dan tahan lama. Kompleksnya kekuatan politik, aktor dan ideologi menjadi faktor yang

menyulitkan. Varian koalisi di Indonesia memang tidak terbangun berdasarkan landasan yang kuat. Koalisi tidak sekadar dimaknai sebagai pertemanan akan tetapi harus dibangun dengan sasaran yang jelas. Koalisi partai politik dalam mendukung calon Kepala Daerah sangat pragmatis dan tidak berdasarkan pada ideologi partai yang sama namun syarat akan kepentingan (Romli 2017). Secara teoritis, koalisi tidak terlepas dari adanya kepentingan elit dibelakangnya. Kepentingan elit yang bermain dalam menentukan arah koalisi ini menyebabkan terkadang tidak dapat dijabarkan di tingkatan bawah (Abdar 2018).

Pada era reformasi partai politik mengalami konflik internal. Faktor penyebab konflik tersebut disebabkan oleh pilihan koalisi dan oposisi. Kecenderungan konflik internal bukan disebabkan perbedaan visi-misi, platform dan ideologi partai, tetapi cenderung disebabkan oleh pragmatisme atas pilihan koalisi partai politik dalam mendukung calon dan/atau pemerintahan serta kepentingan kekuasaan (Romli 2017).

Berdasarkan pengalaman pemilu 1999 hingga 2019, peta koalisi partai politik yang terbentuk mengalami perbedaan. Jika pada pemilu 1999, koalisi partai-partai Islam menjadi poros penting dalam menghadirkan calon presiden maka pada pemilu 2004 dan 2009 terjadi pergeseran partai islam dalam kecenderungan pilihan koalisi yaitu tidak berbasis partai Islam namun justru mulai berkoalisi dengan partai nasionalis. Dalam konteks ini, pilihan koalisi tidak didasarkan pada kesamaan ideologi. Adapun pemilu 2014 dan 2019, pembentukan koalisi partai-partai politik justru diwarnai dengan munculnya isu politisasi agama di masing-masing kubu capres.

Berdasarkan dinamika yang terjadi Dalam membangun koalisi, partai-partai politik di Indonesia dari pemilu ke pemilu era reformasi menunjukkan bahwa dalam membangun koalisi, partai-partai politik memiliki kecenderungan pragmatisme politik, di mana kebutuhan untuk memperoleh jabatan-jabatan

politik seperti kursi menteri dan pimpinan di parlemen adalah tujuan partai (Ekawati 2019).

Dewasa ini, partai politik dalam melaksanakan fungsinya untuk melakukan rekrutmen Kepala Daerah merubah dirinya menjadi “pedagang kekuasaan”. Dimana partai politik menjual belikan jabatan kepada calon yang ingin mengikuti pemilihan umum Kepala Daerah. Sehingga calon yang ingin merebut hati suatu partai politik harus melakukan mahar politik terlebih dahulu (Romli 2017).

Partai politik berkoalisi dengan bersikap pragmatism, mengesampingkan ideologi dan syarat akan kepentingan sesuai dengan penelitian dari Hertanto and Sulaiman (2013) dalam pilkada Lampung, Makhasin (2016) dalam Pilkada di Jawa Tengah, Syamsuadi dkk, (2020) dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Riau tahun 2018 yang menyatakan PKS berhasil membuktikan bahwa pragmatisme politik melalui strategi politik terbuka menjadi kunci penopang keberhasilannya dalam persaingan politik di Indonesia. Selain itu, Hermanto (2019) dalam Positioning Ideologi Partai Politik dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Adil Makmur Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 terlihat bahwa Partai politik tidak lagi menjadikan ideologi partai sebagai dasar dalam membangun koalisi. Pergeseran positioning ideologi partai tersebut terjadi pada semua partai.

Disisi lain, koalisi partai sangat menentukan kemenangan paslon, pasalnya dengan koalisi partai yang solid mampu menggerakkan mesin partai, konsolidasi antar kader partai mampu menciptakan situasi yang menguntungkan pasangan calon, terlebih apabila paslon tersebut diusung oleh partai yang secara organisasi kuat dan mempunyai pendukung loyal. (Setyadi 2017). Hasil penelitian Putri and Qodir (2017) dalam pilkada di Kabupaten Bantul tahun 2015 koalisi partai politik merupakan salah satu faktor kemenangan pasangan calon.

Setelah beberapa fenomena koalisi partai politik di beberapa daerah di Indonesia yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam bab selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai strategi koalisi partai politik dalam pilwakot Bandar Lampung tahun 2020. Pada bab hasil dan pembahasan akan menganalisis fenomena dibalik pembentukan koalisi partai politik pendukung Eva Dwiana dan Deddy Amarullah serta strategi pemenangan yang digunakan dalam memperoleh suara tertinggi pada pilwakot Bandar Lampung tahun 2020.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Nasional Demokrat dan Gerakan Indonesia Raya berkoalisi dalam kemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah berdasarkan kesamaan tujuan. Partai politik di Bandar Lampung berkoalisi pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 dalam menentukan arah koalisi tidak berdasarkan pada ideologi partai, melainkan berdasarkan tujuan partai politik, tingkat elektabilitas dan popularitas calon serta *figur* calon kepala daerah yang menentukan partai politik dalam menentukan koalisi. Koalisi partai politik ditingkat nasional tidak berpengaruh dalam partai politik berkoalisi di tingkat lokal dalam hal ini koalisi partai politik di Bandar Lampung tahun 2020. PDI P dan Gerindra ditingkat pusat pada pemilihan umum tahun 2014 dan 2019 tidak dalam satu koalisi namun di Kota Bandar Lampung pada pilkada tahun 2020 bergabung dalam satu koalisi.
2. Berdasarkan teori strategi kemenangan menurut Kotten yang terdiri dari empat macam strategi, strategi kemenangan yang lebih berpengaruh dalam kemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah adalah strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan. Strategi pendukung sumber daya yang terdiri sumber tenaga yaitu partai pengusung, partai pendukung dan tim kemenangan. Sumber keuangan yaitu dana kampanye terbesar dari pasangan lain yang bersumber dari dana pribadi calon sebesar 3M dan selanjutnya yaitu sumber teknologi dengan kampanye melalui media sosial.

Strategi kelembagaan yaitu partai politik, relawan dari berbagai macam organisasi dan lsm serta Majelis Taklim Rahmat Hidayat dengan dipimpin langsung oleh Eva Dwiana yang anggotanya ibu-ibu sampai ketingkat kelurahan memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut tiga yaitu Eva Dwiana dan Deddy Amarullah.

6.2 Saran

1. Sebaiknya biaya politik tidak dibebankan kepada pasangan calon, namun pembiayaan politik dari luar. Reformasi elektoral yaitu dengan pembiayaan politik dari negara. Jika dana politik dari pasangan calon maka akan menyebabkan politik balik modal.
2. Sebaiknya struktur partai bekerja dalam proses pilkada, tidak hanya sebatas permasalahan administratif saja namun berpartisipasi aktif dalam setiap proses pelaksanaan pilkada. Partai politik ikut mengawal dan mengawasi paslon yang mereka telah mereka usung.
3. Dalam lingkup penelitian yang terbatas, peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya yaitu menganalisis lebih dalam mengenai partai politik sebagai agen dalam pilkada. Dalam hasil penelitian ini diketahui bahwa hubungan emosional yang terjalin antar elit politik mempengaruhi calon yang akan mendapatkan rekomendasi dari DPP dan uang tidak berperan dalam hal tersebut. Selain itu, penelitian mengenai mahar politik dan patronase jangka panjang terkait janji politik dan kedudukan dalam birokrasi merupakan penelitian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). 2017. *Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 07.892/B.1-KWK/DPP-Gerindra/2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota*.
- (DPP) PDI Perjuangan. 2019. *Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Nomor : 1544/IN/DPP/VII/2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota*.
- Abdar, Yusrijal. 2018. "Koalisi Partai Politik Dalam UU No 10 Tahun 2016." *Jurnal Hukum Magnum Opus* Vol 1(No 1):53.
- Abidin, Zainal. 2020. "Pemanfaatan Media Massa Oleh Calon Bupati Mandailing Natal Untuk Memperoleh Dukungan Masyarakat Di Pilkada 2020." UMSU.
- Agustino, Leo. 2020. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.
- Akbar, Yusrijal. 2018. "Koalisi Partai Politik Dalam UU No 10 Tahun 2016." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 1(1).
- Amalia, luky sandra. 2019. "Upaya Mobilisasi Perempuan Melalui Narasi Simbolik Emak-Emak Dan Ibu Ibu Pada Pemilu 2019." *Jurnal Penelitian Politik* 16(1):17–33.
- Anggraeni, Tyas Dian. 2018. "Danger of Political Dowry In Indonesia : An Early Analysis of Corruption." *Indonesian Law Journal* Vol 11.
- Antaraneews.com. 2021. "Eva-Deddy Dapat Bantuan Hukum Dan Advokasi DPP PDIP." *M.Antaraneews.Com*.
- Apriani, Reni, and Maharani. 2019. "Strategi Pemenangan Pasangan Calon Herman Deru Dan Mawardi Yahya Pada Pilkada Sumatera Selatan Tahun 2018." *Jurnal Studi Sosial Dan Politik* Vol 3(No. 1):17–27.
- Arif, Muhammad. 2019. "Strategi Political Marketing Pasangan HM. Warden-H. Syamsudin Uti Pada Pilkada Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018." *Jurnal Dinamika Pemerintahan* Vol 2(No. 1):14–32.
- Aspinall, Edward, and Ward Berenschot. 2019. *Democracy For Sale*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Baleri, Dio. 2017. "Strategi Pemenangan Herman HN-Yusuf Kohar Dalam Pilwakot Bandar Lampung Periode 2016-2021." Universitas Lampung.
- Barakso, Maryan, M. Sabet Daniel, and Brian Scahffner. 2014. *Understanding Political Science Research Methods : The Challenge of Inference*. New York: Routledge.
- Be1Lampung.com. 2020. "PT SGC Diminta Tak Lagi Ikut Pilkada Di Lampung." *Be1lampung.Com*.
- Bravos Radio Indonesia. 2021. *Peran Uang Dalam Politik Di Indonesia Sangat Kuat (Ward Berenschot -Profesor Univ. Amsterdam)*. Indonesia: www.youtube.com.
- Budiardjo, Miriam. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia pustaka utama.
- Bungin, Burhan. 2015. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darmastuti, Ari. 2020. *Partai Politik, Pemilihan Umum Dan Peran Perempuan Dalam Politik Dan Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit Quantum.
- DetikNews. 2013. "Partai NasDem Optimistis Masuk 3 Besar Di Pemilu 2014." *New.Detik.Com*.
- DetikNews. 2021. "Eva-Deddy, Paslon Pemenang Pilkada Bandar Lampung Didiskualifikasi KPU." *New.Detik.Com*.
- Djuyandi, Yusa. 2011. "Oalisi Partai Politik Untuk Demokrasi : Membangun Demokrasi Kebanggaan Dalam Nuansa Pluralisme." *Jurnal Humaniora* Vol 2(No. 2).
- DPP Partai NasDem. 2017. *Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Nomor : 149-Kpts/DPP-NasDem/VIII/2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Provinsi Lampung Dari Partai NasDem*.
- Efriza, and Jefry Indrawan. 2019. *Pengantar Politik Sebuah Telaah Empirik Dan Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ekawati, Esty. 2019. "Peta Koalisi Partai Politik Di Indonesia Pada Pemilihan Presiden Era Reformasi." *JPPUMA : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA* 7(2).
- Ekowati, Endah Yuli. 2019. "Pragmatisme Politik : Antara Koalisi, Pencalonan, Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada." *Transformative* 5(1):16–37.
- Fajaria, Melda. 2019. "Orientasi Politik Jamaah Majelis Taklim Rahmat Hidayat." Universitas Lampung.
- Farida, Ida. 2019. "Mahar Politik Dalam Pandangan Politik Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol 7(No 1).

- Fauziah, Rhesty Sundari. 2016. "Strategi Koalisi Partai Politik Dalam Pemenangan Pasangan Zulkifli Dan Eko Suharjo Pada Pemilukada Di Kota Dumai Tahun 2015." *Jom Fisip* 3(2).
- Firman Noor. 2018. "Pilkada, Peran Partai Politik, Dan Konstelasi Pragmatis Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng Dan Jatim (2017-2018)." *Jurnal Penelitian Politik* 15(2).
- Firmanzah. 2018. *Mengelola Partai Politik ; Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fuad, Anis, and Kandung Sapto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gunawan, Arry Bainus;, and Caroline Paskarina. 2020. "Strategi Politik Koalisi Partai Dalam Pemenangan Paslon Kepala Daerah : Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017." *POLITEA: Jurnal Politik Islam* 3(1):51–68.
- Gunawan, Wawan. 2018. "Anomali Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Dalam Sistem Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Academia Praja* 1(1).
- Hadiawan, Agus. 2009. "Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Provinsi Lampung (Studi Di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro Dan Kota Bandar Lampung)." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* Vol 3(No. 7).
- Hellmann, Olli. 2011. *Political Parties and Electoral Strategy : The Development of Party Organization in East Asia*. Hampshire and New York: Palgrave Macmillan.
- Hendrawan, Adrianus, Ward Berenschot, and Edward Aspinall. 2021. "Parties as Pay-off Seekers: Pre-Electoral Coalitions in a Patronage Democracy." *Electoral Studies* 69(November 2019):102238Slater, D., Simmons, E. (2013). Coping by co. doi: 10.1016/j.electstud.2020.102238.
- Hermanto, Bambang. 2019. "Positioning Ideologi Partai Politik Dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Adil Makmur Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019." *Jurnal Transformative* 5(1).
- Hertanto, and Nidzammuddin Ahmad Sulaiman. 2013. "Koalisi Transaksional Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Lampung." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 12(2):8–29. doi: 10.21009/jimd.v12i2.6282.
- Hikmawati, Fenti. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Irawan, Ali. 2016. "Koalisi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Pada Pemilihan Presiden Tahun 2014." Universitas Pendidikan Indonesia.

- Kandati, Matias Rifal. 2015. "Strategi Kampanye Politik Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015." *Jurnal Ilmiah FISIP UNPI Lyceum* 3.
- Katz, R. S., and W. Crotty. 2014. *Hand Book Partai Politik*. Bandung: Nusamedia.
- Kompas.com. 2020. "KPK Catat 300 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi Sejak Pilkada Langsung." *Amp.Kompas.Com*.
- Kompasaina.com. 2019. "Marhaenisme, Sebuah Fakta Perjuangan PDIP." *Kompasaina.Com*.
- Kpu-bandarlampungkota.go.id. 2020. "Syarat Pencalonan Eva Dwiana Dan Deddy." *Kpu Kota Bandar Lampung*.
- Kurniawati, Endri. 2019. "Habis Beri Dukungan Di Pemilu, Minta Jatah Menteri Kemudian." *Fokus.Tempo.Com*.
- Labolo, Muhadam, and Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lampost.co. 2018. "Mahar Politik, Pilkada Dan Suap." *M.Lampost.Co*.
- Lampost.co. 2020. "Zonasi Dan Batasan Maksimal Dana Kampanye Pilkada Bandar Lampung." *Lampost.Co*.
- Lampost.co. 2021. "Mahar Politik Rp 4 Miliar Dibebankan Kepada Mustafa." *Lampost.Co*.
- Lampung.tribunnews.com. 2020. "PAN Usulkan Kader Internal Dampingi Eva Dwiana Di Pilkada Bandar Lampung 2020." *Tribun Lampung*.
- Lampungpro.co. 2020a. "Pilkada Bandar Lampung, Diusung PDI P, NasDem Dan Gerindra, Eva-Deddy Daftar Ke KPU." *Lampungpro.Co*.
- Lampungpro.co. 2020b. "Pilkada Bandar Lampung, PAN Jatuhkan Rekomendasi Ke Eva Dwiana." *Lampungpro.Co*.
- Lijphart, Arend. 1995. *Sistem Pemerintahan Parleментар Dan Presidensial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Liputan6.com. 2019. "Menakar Ketangguhan Koalisi Gajah Di Pilkada 2020." *Liputan6.Com*.
- m.kumparan.com. 2021. "Gerebek Sungai, Walikota Bandar Lampung Ingin Masalah Banjir Tertuntaskan." *M.Kumparan.Com*.
- M.mediaindonesia.com. 2020. "Rakyat Korban Biaya Politik Mahal." *Media Indonesia*.
- Mahmud, Insan. 2018. "Strategi Pemenangan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemilu Legislatif Kota Salatiga Tahun 2009." *Jurnal Ilmu Politik* 9(1).

- Makhasin, Luthfi. 2016. "Orientasi Ideologi Dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi Dalam Pilkada Serentak Di Jawa Tengah 2015." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 19(3):234. doi: 10.22146/jsp.15685.
- Manzilati. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma, Metode Dan Aplikasi*. Malang: UB Press.
- Miles., B. A. Mathew, and Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, and Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, and Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, and Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Netizenku.com. 2020. "PAN Siap Menangkan Eva." *Netizenku.Com*.
- Pamungkas, Sigit. 2011a. *Partai Politik: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Pamungkas, Sigit. 2011b. *Partai Politik Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Partainasdem.id. 2013. "Sejarah Partai NasDem." *Partainasdem.Id*.
- Phrosakh, Kresna Dewanata. 2020. "Rasionalitas Partai NasDem Mengusung Basuki Tjahaya Purnama Sebagai Calon Gubernur Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017." Universitas Muhamadiyah Malang.
- Pilkada2020.kpu.go.id. 2020. "HITUNG SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BANDAR LAMPUNG." *Pilkada2020.Kpu.Go.Id*. Retrieved (https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsur/1871).
- Purba, Darmawan. 2012. "Pola Koalisi Partai Berbasis Islam Pada Kasus Proses Rekrutmen Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2010 – 2015." Universitas Lampung.
- Putri, Iranda. 2019. "Analisis Motif Koalisi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 Studi Pada Partai NasDem, PKS Dan Hanura." Universitas Lampung.
- Putri, Masdiyan, and Zuli Qodir. 2017. "Faktor Kemenangan Koalisi Suharsono-Halim Dalam Pemenangan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015." *Journal of Governance and Public Policy* 4(1).

- radarlampung.co.id. 2020. "Empat Rekom PDIP Keluar, Eva Dwiana Ke Pilwakot Bandar Lampung, Ini Rinciannya." *Radarlampung.Co.Id*.
- Rentjoko, Antyo. 2018. "Mahar Dalam Pernikahan, Perdukunan Dan Pilkada." *Lokadata.Id*.
- Ridho, Al-Hamdi. 2013. *Partai Politik Islam, Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.
- rmollampung.id. 2021. "DPP PDI P Dan Koalisi Partai Kawal Gugatan Eva - Deddy Ke Ma." *Rmollampung.Id*.
- Rochmi, Muhammad Nur. 2019. "Pilpres Usai, PDIP Dan Gerindra Bakal Mesra Di Pilkada 2020." *Beritagar.Id*.
- Romli, Lili. 2017. "KOALISI DAN KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK PADA ERA REFORMASI." *Politica* Vol. 8(No. 2).
- Salusu, J. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: PT Gramedia Widiasaran Indonesia.
- Salvatore, Simarmata. 2014. *Media Dan Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sastriadi, Anggri. 2020a. "DPD PAN Bandar Lampung Dan DPW Berselisih, Terkait Surat Tugas Ke Eva Belum Jelas." *Radarlampung.Co.Id*.
- Sastriadi, Anggri. 2020b. "Pilkada Lamteng, Tanda-Tanda SGC Merapat Ke Loekman." *Radarlampung.Co.Id*.
- Satori, Djaman, and Aan Komariah. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Schroder, Peter. 2013. *Strategi Politik*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit, Indonesia.
- Sembada, Windhiadi Yoga, and Priyono Sadjijo. 2020. "Strategi Pesan Aktor Politik Dalam Media Sosial." *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan (KOMASKAM)* Volume 2(Nomor 1).
- Setyadi, Dery. 2017a. "Strategi Koalisi Partai Terhadap Pemenangan Pasangan Haris-Zardewan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015." *Jom Fisip* 4(2):1–14.
- Setyadi, Dery. 2017b. "Strategi Koalisi Partai Terhadap Pemenangan Pasangan Haris-Zardewan Dalam Pilkada Pelalawan Tahun 2015." *Jom Fisip* 4(2).
- Siboy, Ahmad. 2021. "Implikasi Pola Koalisi Partai Politik Terhadap Dinamika Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Indonesia." *Jurnal Perspektif Hukum* Vol 21(No 1).
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

- Slater, D., Simmons, E. 2013. "Coping by Colluding Political Uncertainty and Promiscuous Powersharing in Indonesia and Bolivia." *Comp. Polit. Stud.* 46(11):1366–1393.
- Sudaryono. 2017. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: CV Solusi Distribusi.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. 2014. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sujatmiko, Ananda Putri. 2016. "KARTELISASI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015." Universitas Lampung.
- Suluh.co. 2021. "Mahar Politik Rp. 24 Miliar Ke PKB Dan Hanura Di Lampung Buat MAKI Jengkel." *Suluh.Co*.
- Syamsuadi, Amir, Zamhasari Zamhasari, Seri Hartati, and Liza Trisnawat. 2020. "Pragmatisme Partai Islam: Strategi Politik Terbuka Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10(1).
- Syukri, Ahmad, and Ricky Meilandi. 2018. "Strategi Partai Koalisi Dalam Pemenangan AW Nofiadi Mawardi-Ilyas Panji Alam Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015." *Jurnal Studi Sosial Dan Politik* 2(1):31–43.
- Terasparlemen.com. 2020. "Hanura Merapat, Mesin Partai-Partai Pendukung Eva-Deddy Mulai Dipanaskan." *Terasparlemen.Com*.
- Tribun TV Lampung. 2021. *Pilkada 2024 Dan Fenomena Mahar Politik*. Indonesia.
- Ulsikri, Ahmad Robi. 2021. "Menakar Popularitas Calon Dan Isu Pilkada Serentak 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19 Berdasar Kacamata Pengguna Internet : Studi Analisis Di Bandar Lampung." in *Pilkada Di Masa Pandemi : Tantangan dan Harapan Dari Beragam Perspektif*.
- UU RI. 2016. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota*.
- Warjio. 2020. *Tata Kelola Partai : Bagaimana Partai Politik Bekerja Dalam Gelombang Demokrasi*. Medan: Gerhana Publishing.

- Warjio, Muhammmad Fuad Othman, and Suyatno Ladiqi. 2021. *Good Party Governance. Praktik Partai Politik Di Malaysia Dan Indonesia Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Medan: Gerhana Media Kreasi.
- Winagun, Ardi. 2018. "PDIP Dan Gerindra-PKS Pun Bisa Cair." *Detiknews*.
- Wospakrik, Decky. 2016. "Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensil Di Indonesia." *Papua Law Journal* Vol 1(No. 1):159.